

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca

secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2024 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 11 Juni 2025
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. H. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.

Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19770103 200012 1 002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 11 Juni 2025
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. H. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19770103 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah ..	2
BAB II INFORMASI UMUM DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN	
RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH	4
2.1 Profil Dinass Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah ...	4
2.2 Kegiatan Pokok Organisasi	5
2.3 Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi	
Tengah	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	10
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	10
3.1.1 Pendapatan	10
3.1.2 Belanja	11
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	13
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca	14
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	26
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	28
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	30

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada	
Dalam SAP	31
4.4.1 Koreksi Kesalahan	31
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT	
DAERAH.....	33
5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	33
5.1.1 Pendapatan Daerah.....	33
5.1.1.1 Retribusi Daerah	34
5.1.1.2 Lain-Lain PAD Yang Sah	34
5.1.2 Belanja.....	34
5.1.2.1 Belanja Operasi	37
5.1.2.2 Belanja Modal	47
5.1.3 Surplus/Defisit LRA.....	51
5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca	51
5.2.1 Aset	51
5.2.1.1 Aset Lancar	52
5.2.1.2 Aset Tetap	55
5.2.1.3 Aset Lainnya	71
5.2.2 Kewajiban	72
5.2.3 Ekuitas.....	72
5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional.....	72
5.3.1 Pendapatan LO	73
5.3.2 Beban.....	75
5.3.3 Surplus/Defisit – LO	84
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	84
5.4.1 Ekuitas Awal	84
5.4.2 Surplus/Defisit LO	84
5.4.3 RK PPKD	85
5.4.4 Koreksi Ekuitas Lainnya	85
5.4.5 Analisis Laporan Keuangan	86
BAB VII PENUTUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Sumber Daya Manusia Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2024	4
Tabel 2.2	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan.....	4
Tabel 2.3	Distribusi Sumber Daya Manusia Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2024.....	5
Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah 2024	10
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	10
Tabel 3.3	Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	11
Tabel 4. 1	Batasan Minimal Kapitalisasi Aset	18
Tabel 4. 2	Masa Manfaat Aset Tetap	21
Tabel 5. 1	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024.....	34
Tabel 5. 2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	35
Tabel 5. 3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024 ...	37
Tabel 5. 4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	37
Tabel 5. 5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024.....	38
Tabel 5. 6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	39
Tabel 5. 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	40
Tabel 5. 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	41

Tabel 5. 9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	42
Tabel 5. 10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	43
Tabel 5. 11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	44
Tabel 5. 12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	45
Tabel 5. 13	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	47
Tabel 5. 14	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	48
Tabel 5. 15	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024.....	49
Tabel 5. 16	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	49
Tabel 5. 17	Rincian Aset Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024.....	52
Tabel 5. 18	Rincian Aset Lancar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	53
Tabel 5. 19	Rincian Aset Lancar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	54
Tabel 5. 20	Rincian Persediaan Akhir Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	55
Tabel 5. 21	Aset Tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	55
Tabel 5. 22	Rincian Rekap Ekstrakompatabel Aset Tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	57
Tabel 5. 23	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024	57
Tabel 5. 24	Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	58

Tabel 5. 25	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	59
Tabel 5. 26	Rincian kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	59
Tabel 5. 27	Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	60
Tabel 5. 28	Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	60
Tabel 5. 29	Rincian Kapitalisasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024...	60
Tabel 5. 30	Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	61
Tabel 5. 31	Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024...	61
Tabel 5. 32	Rincian Belanja Modal Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	62
Tabel 5. 33	Rincian Kapitalisasi Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	62
Tabel 5. 34	Rincian Reklasifikasi ke Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	65
Tabel 5. 35	Rincian Reklasifikasi ke Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	66
Tabel 5. 36	Rincian Aset Tetap Lainnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	67
Tabel 5. 37	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	67
Tabel 5. 38	Rincian Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024	67
Tabel 5. 39	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	69

Tabel 5. 40	Rincian Akumulasi Penyusutan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	70
Tabel 5. 41	Rincian Nilai Buku Aset Tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	70
Tabel 5. 42	Rincian Mutasi Aset Lainnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	71
Tabel 5. 43	Rincian penghapusan Aset Lainnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	71
Tabel 5. 44	Rincian Utang Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	72
Tabel 5. 45	Rincian Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	73
Tabel 5. 46	Rincian Pendapatan Asli Daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	74
Tabel 5. 47	Rincian Beban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	75
Tabel 5. 48	Rincian Beban Pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	76
Tabel 5. 49	Rincian beban dan belanja barang dan jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	77
Tabel 5. 50	Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	82
Tabel 5. 51	Ekuitas Akhir Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan 2023.....	84
Tabel 5. 52	Koreksi Ekuitas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1	Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	33
Gambar 5. 2	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023	35
Gambar 5. 3	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Tahun 2024....	36
Gambar 5. 4	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2024.....	38
Gambar 5. 5	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai Tahun 2024.....	39
Gambar 5. 6	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang dan Jasa	42
Gambar 5. 7	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024	48
Gambar 5. 8	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Perlatan dan Mesin Tahun 2024	50
Gambar 5. 9	Komposisi Jenis Aset per 31 Desember 2024.....	52
Gambar 5. 10	Komposisi Jenis Aset Tetap per 31 Desember 2024	56
Gambar 5. 11	Komposisi Jenis Pendapatan LO Tahun 2024	73
Gambar 5. 12	Komposisi Jenis Beban Tahun 2024.....	75
Gambar 5. 13	Komposisi Beban Penyusutan Tahun 2024	83

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 15 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan / penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan /

penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah. Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan.

Bab VI Penutup

Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2024 telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual pada pemerintah Daerah.

BAB II
INFORMASI UMUM
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1. Profil Dinass Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 2.1
Distribusi Sumber Daya Manusia
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	19
2.	Golongan III	112
3.	Golongan II	58
4.	Golongan I	1
Jumlah		190

Tabel 2.2
Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II.a	1
2.	Eselon III.a	5
3.	Eselon III.b	1
4.	Eselon IV.a	18
5.	Staf	165
Jumlah		190

Tabel 2.3
Distribusi Sumber Daya Manusia
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana / S3	1
2.	Pasca Sarjana / S2	32
3.	Sarjana / S1	90
4.	Sarjana Muda	5
5.	STM/SMEA/SMK/SMA	61
6.	SD	1
Jumlah		190

2.2. Kegiatan Pokok Organisasi

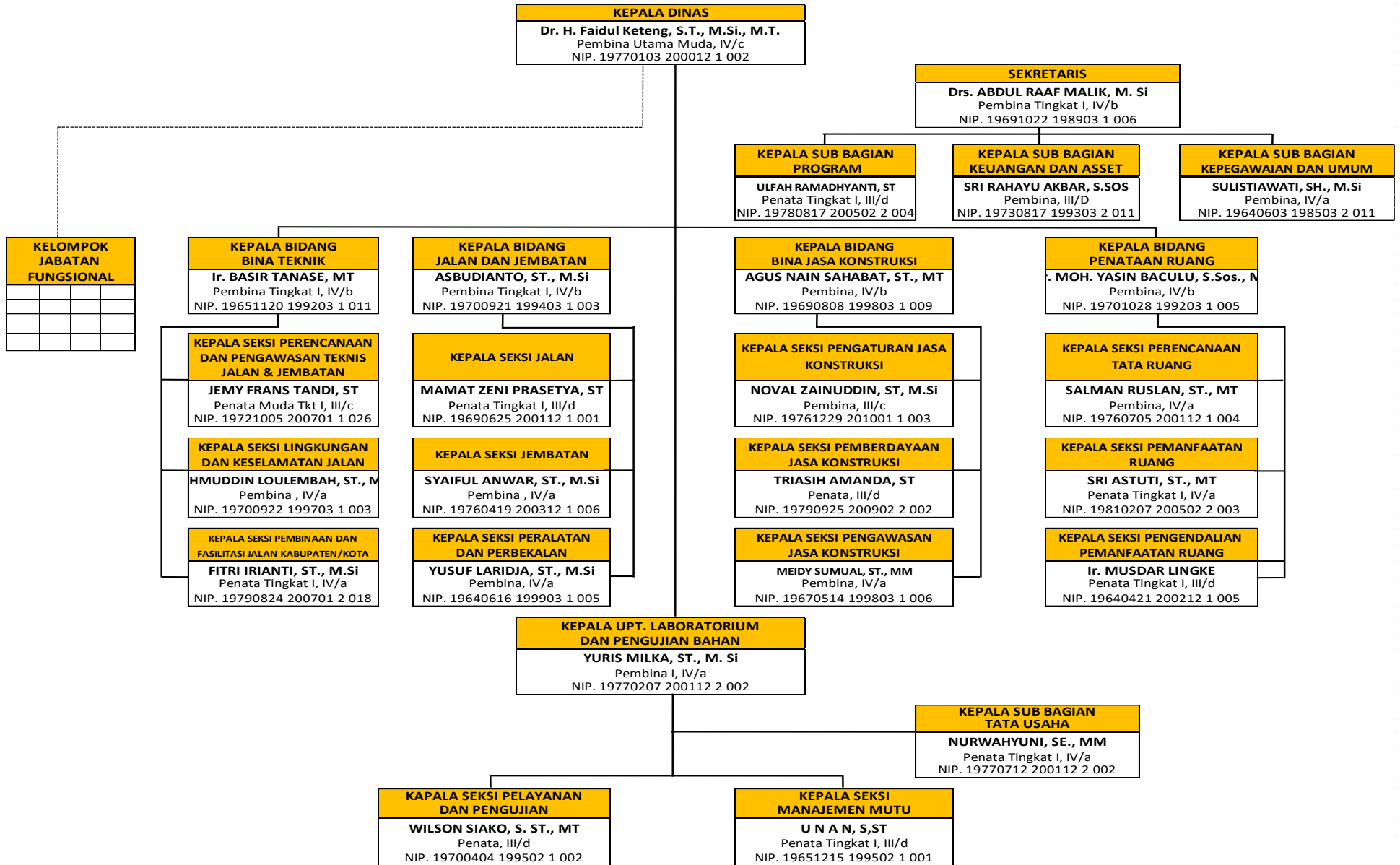
Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang jalan dan jembatan dan bina jasa konstruksi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang jalan dan jembatan dan bina jasa konstruksi;
2. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang jalan dan jembatan dan bina jasa konstruksi;
3. fasilitasi pelaksanaan tugas bidang jalan dan jembatan, meliputi pembinaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan jalan;
4. fasilitasi pelaksanaan tugas pembinaan jasa konstruksi meliputi pengembangan sumber daya manusia, pembinaan industri jasa konstruksi dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi jasa konstruksi;
5. pengendalian atas penyelenggaraan program di bidang jalan dan jembatan dan bina jasa konstruksi; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi

5 (lima) unit Eselon III dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis. Struktur organisasi Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana disajikan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH



2.3. Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Visi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

“Terwujudnya Prasarana Jalan dan Jembatan yang Berkualitas Guna Memberikan Kenyamanan dan Keselamatan pada Masyarakat di Tahun 2024”

Dalam rangka mencapai visi tersebut Dinas Bina Marga menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan;
2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu pembangunan prasarana jalan dan jembatan; dan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih (Kurang)
Pendapatan	3.183.000.000,00	3.186.569.950,00	100,11	3.569.950,00
Belanja	513.553.349.164,11	504.886.316.334,47	98,31	(8.667.032.829,64)
Surplus/Defisit	(510.370.349.164,11)	(501.699.746.384,47)	98,30	8.670.602.779,64

3.1.1 Pendapatan

Pada Tahun 2024 Anggaran Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp3.186.569.950,00. Kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan Tahun 2024 adalah 100,11 persen atau sebesar Rp3.186.569.950,00. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.183.000.000,00	3.186.569.950,00	3.569.950,00	100,11
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.180.000.000,00	3.116.778.200,00	(63.221.800,00)	98,01
Hasil Sewa BMD	3.000.000,00	69.791.750,00	66.791.750,00	2.326,39

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang diperoleh berasal dari Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp3.116.778.200,00 atau 98,01 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp3.180.000.000,00 dan Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar Rp69.791.750,00 atau 2.326,39 persen dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00.

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang Penataan Ruang, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 mengelola anggaran belanja sebesar Rp504.886.316.334,47 yang terdiri enam program. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp42.944.062.848,00 atau 89,76 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran Program Penyelenggaraan Jalan terealisasi sebesar Rp455.987.772.291,47 atau 99,23 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggran Program Pengembangan Jasa Konstruksi terealisasi sebesar Rp1.356.421.317,00 atau 94,68 persen dari jumlah yang dianggarkan, realiasi anggaran Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp1.691.016.175,00 atau 97,52 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp1.892.894.064,00 atau 95,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dan realisasi anggaran Program Penyelenggaraan Jalan terealisasi sebesar Rp1.042.575.283,00 atau 99,89 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.845.665.197,00	42.944.062.848,00	89,76
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.425.856.235,00	1.130.877.978,00	79,31
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.190.659.218,00	19.884.451.632,00	85,74
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	696.649.150,00	695.443.450,00	99,83
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.654.140.039,00	1.594.153.046,00	96,37
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.572.769.985,00	8.579.624.900,00	89,63
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.499.620.870,00	7.462.952.142,00	99,51

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.805.969.700,00	3.596.559.700,00	94,50
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	459.521.151.860,00	455.987.772.291,47	99,23
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	459.521.151.860,00	455.987.772.291,47	99,23
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.432.664.750,00	1.356.421.317,00	94,68
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.000.918.550,00	952.524.443,00	95,17
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	202.690.950,00	184.756.436,00	91,15
Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	229.055.250,00	219.140.438,00	95,67
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.734.014.125,00	1.662.590.531,00	95,88
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	440.287.800,00	424.197.373,00	96,35
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	265.187.550,00	249.071.630,00	93,92
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	458.687.825,00	445.697.245,00	97,17
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	569.850.950,00	543.624.283,00	95,40
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.976.171.411,00	1.892.894.064,00	95,79
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109.880.000,00	102.230.698,00	93,04
Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.396.390,00	278.848.415,00	98,40
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	988.206.680,00	968.126.407,00	97,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.231.667,00	26.674.690,00	88,23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.456.674,00	517.013.854,00	91,59
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.043.681.820,00	1.042.575.283,00	99,89
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.043.681.820,00	1.042.575.283,00	99,89

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2024, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2024.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2024.
 - c. Investasi Jangka pendek
 1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera

diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk jenis penyisihan piutang pajak

1) Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2) Kualitas Kurang Lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3) Kualitas Diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4) Kualitas Macet;

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi:

1) Kualitas Lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan)

2) Kualitas Kurang Lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3) Kualitas Diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4) Kualitas Macet;

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1) Kualitas lancar;

Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2) Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3) Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4) Kualitas macet;

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- e. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

f. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa berikut:
 - a) Barang Konsumsi;
 - b) Barang pakai habis;
 - c) Barang cetakan;
 - d) Perangko dan materai;
 - e) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - f) Amunisi;
 - g) Bahan untuk pemeliharaan;
 - h) Suku cadang;

- i) Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
 - j) Pita cukai dan leges;
 - k) Bahan baku;
 - l) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - m) Tanah/bangunan/barang lainnya yang dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - n) Hewan, tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- a. Aset Tetap:
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Suatu aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batasan Minimal Kapitalisasi Aset

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp. 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp. 300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp. 300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000,00
14	Mebeulair	Rp. 250.000,00
15	Alat Studio	Rp. 300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp. 500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp. 500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp. 300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp. 300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp. 300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp. 300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp. 300.000,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp. 300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp. 300.000,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp. 300.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
30	Senjata Api	Rp. 500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp. 500.000,00
32	Senjata Sinar	Rp. 500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp. 500.000,00
34	Komputer Unit	Rp. 300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp. 300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10.000.000,00
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp. 0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp. 0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000,00
	b. Ternak	Rp. 500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp. 300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

10. Semua aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing aset.
- b. Properti Investasi
1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 3. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
 4. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 5. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- c. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 3. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya

aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
 - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembaliterhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah..

b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Surplus atau Defisit

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
- c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 1. Pendapatan Asli Daerah,
 2. Pendapatan Transfer, dan
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 1. Saat timbulnya kewajiban;
 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan

3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 3. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- h. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
1. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 2. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 3. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 4. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- i. Beban diukur sesuai dengan:
1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
6. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
7. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan

pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

8. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
9. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
10. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
11. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
13. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

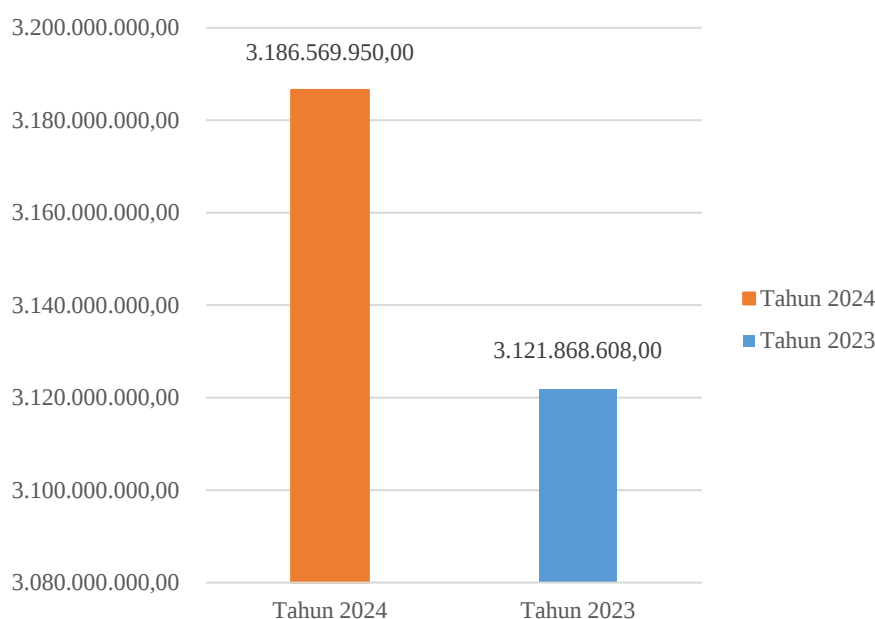
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah	3.186.569.950,00	3.121.868.608,00

Realisasi Pendapatan-LRA Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar Rp3.186.569.950,00 atau 100,11 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.183.000.000,00, Pendapatan terdiri dari dari Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Gambar di bawah dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi pendapatan untuk Tahun 2024 dan tahun 2023.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan Tahun 2023



Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yakni Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Nilai Pendapatan – LRA tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp64.701.342,00 dari tahun 2023 sebesar Rp3.121.868.608,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA terealisasi sebesar Rp3.116.778.200,00 atau 98,01 persen dari target pendapatan sebesar Rp3.180.000.000,00 dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA terealisasi sebesar Rp69.791.750,00 atau 2.326,39 persen dari target pendapatan sebesar Rp3.000.000,00. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	3.180.000.000,00	3.116.778.200,00	98,01
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	3.000.000,00	69.791.750,00	2.326,39
Jumlah	3.183.000.000,00	3.186.569.950,00	100,11

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1.1 Retribusi Daerah	3.116.778.200,00	3.119.868.608,00

Realisasi anggaran retribusi daerah Tahun 2024 sebesar Rp3.116.778.200,00 atau 98,01 persen dari jumlah anggaran pendapatan. Jumlah realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2024 menurun sebesar Rp3.090.408,00 dari realisasi tahun 2023 yang sebelumnya berada pada nilai Rp3.119.868.608,00. Pendapatan retribusi daerah berupa Retribusi Pemakaian Laboratorium.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1.2 Lain-Lain PAD Yang Sah	69.791.750,00	2.000.000,00

Realisasi anggaran lain-lain pendapatan asli daerah Tahun 2024 sebesar Rp69.791.750,00 atau 2.326,39 persen dari anggarannya sebesar Rp3.000.000,00. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp67.791.750,00 dari tahun sebelumnya yang hanya terealisasi sebesar Rp2.000.000,00. Pendapatan retribusi daerah berupa hasil sewa barang milik daerah sebesar Rp2.750.000,00 dan pelunasan piutang uang muka Pengakuan Selisih Realisasi Pembayaran dengan Progres Fisik Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan Kalemago sebesar Rp67.041.750,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2 Belanja	504.886.316.334,47	330.403.477.977,79

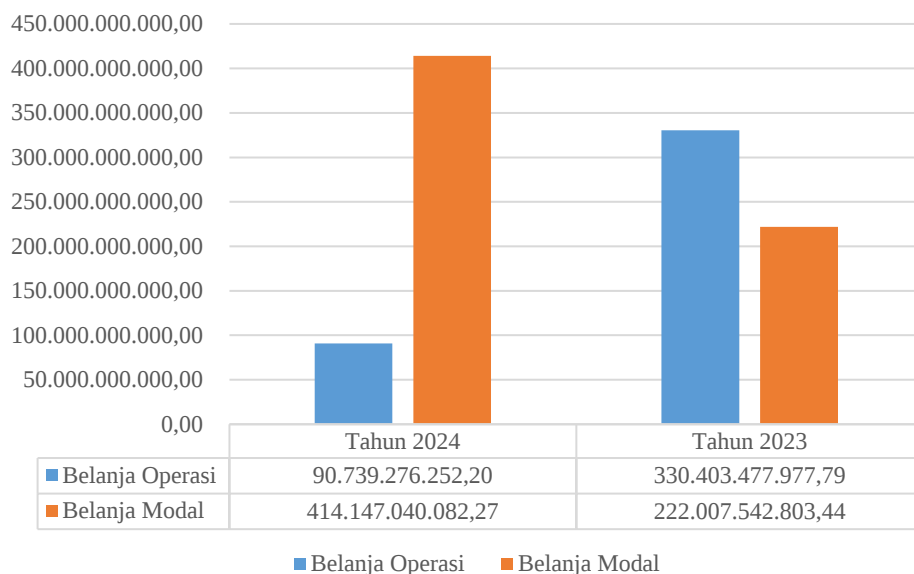
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 sebesar Rp504.886.316.334,47 atau 98,31 persen dari anggaran belanja tahun 2024. Jumlah realisasi belanja tahun ini meningkat sebesar Rp174.482.838.356,68 dari tahun 2023 yang sebelumnya sebesar Rp330.403.477.977,79. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
Belanja Operasi	96.953.154.572,11	90.739.276.252,20	93,59
Belanja Modal	416.600.194.592,00	414.147.040.082,27	99,41
Jumlah	513.553.349.164,11	504.886.316.334,47	98,31

Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp90.739.276.252,20 atau 93,59 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp414.147.040.082,27 atau 99,41 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar di bawah dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk Tahun 2024 dan tahun 2023.

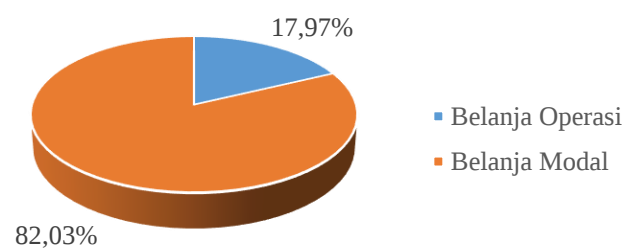
Gambar 5.2
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2024 dan Tahun 2023



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara Tahun 2024 dan tahun 2023. Terjadi penurunan pada bagian belanja operasi sebesar Rp17.656.658.922,15 yang sebelumnya di tahun 2023 sebesar Rp108.395.935.174,35. Berbanding terbalik pada bagian belanja modal, dimana terjadi peningkatan pada tahun 2024 sebesar Rp192.139.497.278,83 dibanding tahun sebelumnya yang hanya terealisasi sebesar Rp222.007.542.803,44 sehingga realisasi belanja modal pada tahun 2024 sebesar Rp414.147.040.082,27.

Masing-masing kelompok Belanja tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar terdapat pada Belanja Modal sebesar 82,02 persen dari total realisasi anggaran belanja, sedangkan untuk komposisi terkecil yaitu Belanja Operasi sebesar 17,98 persen dari total realisasi anggaran belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja
Tahun 2024



Realisasi belanja pada unit kerja Sekretariat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp501.950.846.987,47 atau mencapai 98,32 persen dari anggaran sebesar Rp510.533.495.933,11 sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp8.582.648.945,64. Realisasi belanja pada unit kerja Sekretariat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang terdiri atas realisasi belanja operasi sebesar Rp88.764.080.062,20 dan realisasi belanja modal sebesar Rp413.186.766.925,27. Realisasi belanja pada unit kerja Sekretariat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang merupakan tingkat realisasi tertinggi dibandingkan unit kerja lainnya.

Realisasi belanja pada unit kerja UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan sebesar Rp2.935.469.347,00 atau mencapai 97,21 persen dari anggaran sebesar Rp3.019.853.231,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp84.383.884,00. Realisasi belanja pada unit kerja UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan berasal dari belanja operasi sebesar Rp1.975.196.190,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp960.273.157,00. Berikut rincian realisasi anggaran belanja masing-masing unit Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024

Sub Unit	Anggaran	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)	%
Sekretariat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	510.533.495.933,11	501.950.846.987,47	98,32
Belanja Operasi	94.913.653.021,11	88.764.080.062,20	93,52
Belanja Modal	415.619.842.912,00	413.186.766.925,27	99,41
UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan	3.019.853.231,00	2.935.469.347,00	97,21
Belanja Operasi	2.039.501.551,00	1.975.196.190,00	96,85
Belanja Modal	980.351.680,00	960.273.157,00	97,95

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	90.739.276.252,20	108.395.935.174,35

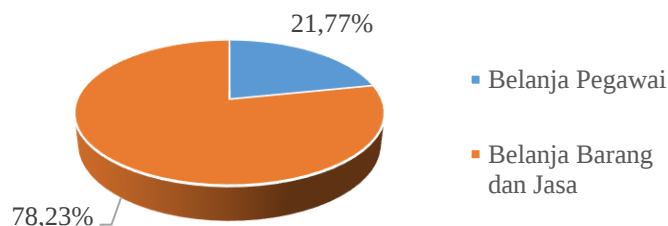
Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 sebesar Rp90.739.276.252,20 atau 93,59 persen dari Anggaran sebesar Rp96.953.154.572,11. Jumlah realisasi Belanja Operasi tahun ini menurun sebesar Rp17.656.658.922,15 dari tahun 2023. Belanja Operasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi Tahun 2024.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
Belanja Pegawai	23.056.226.218,66	19.752.588.632,00	85,67
Belanja Barang dan Jasa	73.896.928.353,45	70.986.687.620,20	96,06
Jumlah	96.953.154.572,11	90.739.276.252,20	93,59

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi Tahun 2024 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp19.752.588.632,00 atau 85,67 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja barang dan jasa sebesar Rp70.986.687.620,20 atau 96,06 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut komposisi dari masing-masing kelompok Belanja Operasi.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Tahun 2024



Berdasarkan Gambar di atas komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Barang dan Jasa 78,23 persen dari total realisasi anggaran Belanja Operasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pegawai sebesar 21,77 persen dari total realisasi anggaran Belanja Operasi.

Unit kerja Sekretariat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp88.764.080.062,20 atau mencapai 93,52 persen dari total yang dianggarkan sebesar Rp 94.913.653.021,11. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp19.752.588.632,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp69.011.491.430,20. Sementara UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan hanya merealisasikan belanja operasi sebesar Rp1.975.196.190,00 atau 96,85 persen dari total anggaran sebesar Rp2.039.501.551,00 dan hanya terealisasi dari belanja barang dan jasa. Berikut rincian realisasi belanja operasi berdasarkan unit kerja.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Bina Marga dan Penataan
Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024

Sub Unit	Anggaran	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)	%
Sekretariat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	94.913.653.021,11	88.764.080.062,20	93,52
Belanja Pegawai	23.056.226.218,66	19.752.588.632,00	85,67
Belanja Barang dan Jasa	71.857.426.802,45	69.011.491.430,20	96,04
UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan	2.039.501.551,00	1.975.196.190,00	96,85
Belanja Barang dan Jasa	2.039.501.551,00	1.975.196.190,00	96,85

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Belanja Pegawai	19.752.588.632,00	19.127.165.135,00

Realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun 2024 sebesar Rp19.752.588.632,00 atau 85,67 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp23.056.226.218,66. Jumlah realisasi

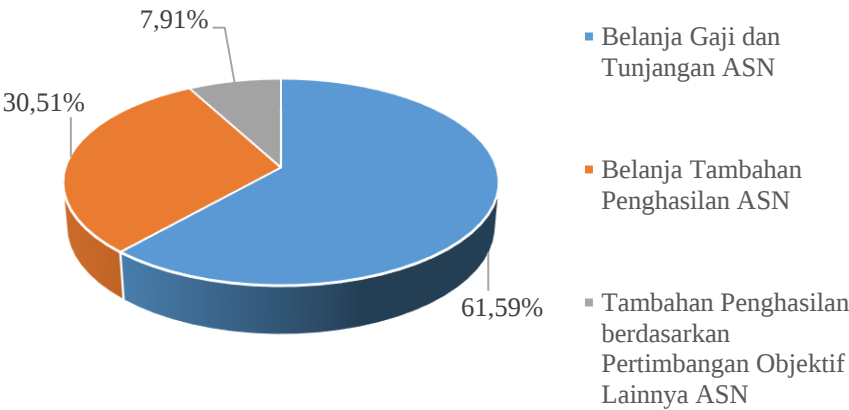
Belanja Pegawai Tahun 2024 meningkat sebesar Rp625.423.497,00 dari tahun 2023. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2024.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
	(Rp)	(Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	14.952.332.986,66	12.164.725.370,00	81,36
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.528.473.232,00	6.026.063.262,00	92,30
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.575.420.000,00	1.561.800.000,00	99,14
Jumlah	23.056.226.218,66	19.752.588.632,00	85,67

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang terdiri tiga item belanja yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp12.164.725.370,00 atau 81,36 persen sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.787.607.616,66, dan berkontribusi sebesar 61,59 persen dari total realisasi belanja pegawai. Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp6.026.063.262,00 atau 92,30 persen dari anggaran sebesar Rp6.528.473.232,00, dan berkontribusi sebesar 30,51 persen dari total realisasi belanja pegawai. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp1.561.800.000,00 atau 99,14 persen dari jumlah yang dianggarkan dan berkontribusi sebesar 7,91 persen dari total realisasi belanja pegawai. Berikut komposisi dari masing item-item belanja pegawai.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai Tahun 2024



Pada masing-masing kelompok Belanja Pegawai tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan

ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok PNS sebesar 82,25 persen dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar 0,001 persen dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang terealisasi. Berikut gambar yang menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Komposisi
Belanja Gaji Pokok PNS	11.994.656.064,44	10.005.799.512,00	83,42	82,25
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.256.163.614,00	970.360.564,00	77,25	7,98
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	306.309.100,00	258.300.000,00	84,33	2,12
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	250.000.000,00	709.900,00	0,28	0,01
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	504.290.750,00	401.795.000,00	79,68	3,30
Belanja Tunjangan Beras PNS	622.452.399,00	519.396.240,00	83,44	4,27
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.043.071,48	8.236.295,00	48,33	0,07
Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.417.987,74	127.859,00	9,02	0,001
Jumlah	14.952.332.986,66	12.164.725.370,00	81,36	100,00

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Tunjangan Fungsional PNS adalah belanja dengan tingkat realisasi terendah dengan tingkat realisasi sebesar Rp709.900,00 atau 0,28 persen dari total anggarannya, sedangkan belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp258.300.000,00 atau 84,33 persen dari total anggarannya. Belanja Gaji Pokok PNS berkontribusi paling besar pada realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yaitu sebesar Rp10.005.799.512,00 atau 82,25 persen, sedangkan belanja dengan kontribusi terendah pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp127.859,00 atau 0,001 persen dari total realisasi.

Pada kelompok Belanja Tambahan Penghasilan ASN hanya terdapat satu item belanja yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dengan realisasi sebesar Rp6.026.063.262,00 atau 92,30 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp6.528.473.232,00. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran

pada Kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Tabel 5.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Komposisi
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	3,84
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.457.460.000,00	1.456.080.000,00	99,91	93,23
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	48.960.000,00	36.720.000,00	75,00	2,35
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,58
Jumlah	1.575.420.000,00	1.561.800.000,00	99,14	100,00

Pada kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar 93,23 persen dari jumlah anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan sebesar 0,58 persen dari jumlah anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang terealisasi. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan merupakan belanja dengan tingkat realisasi tertinggi yaitu 100 persen dari masing-masing anggarannya, sedangkan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa hanya terealisasi sebesar Rp36.720.000,00 atau 75,00 persen dari anggarannya sebesar Rp48.960.000,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	70.986.687.620,20	89.268.770.039,35

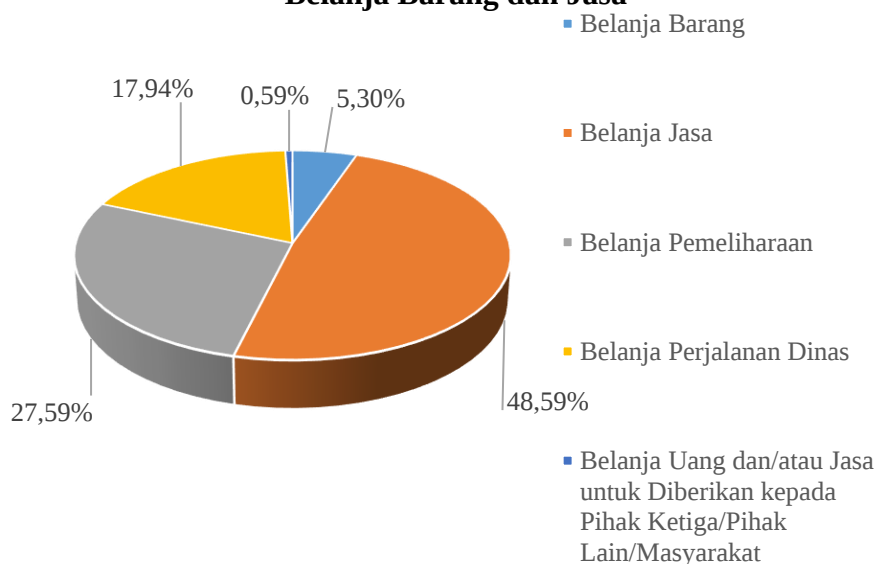
Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 sebesar Rp70.986.687.620,20 atau 96,06 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini menurun sebesar Rp18.282.082.419,15 dari tahun 2023. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2024.

Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Bina Marga dan
Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
Belanja Barang	3.852.569.335,00	3.759.553.307,00	97,59
Belanja Jasa	36.548.968.888,20	34.491.069.958,58	94,37
Belanja Pemeliharaan	20.019.789.257,00	19.582.584.614,62	97,82
Belanja Perjalanan Dinas	13.055.772.602,00	12.733.923.140,00	97,53
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	419.828.271,25	419.556.600,00	99,94
Jumlah	73.896.928.353,45	70.986.687.620,20	96,06

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang terdiri lima item Belanja dimana dengan tingkat realisasi tertinggi ada pada Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp419.556.600,00 atau 99,94 persen dari jumlah yang dianggarkan dan Belanja Jasa merupakan belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar Rp34.491.069.958,58 atau 94,37 persen dari total anggarannya. Berikut komposisi pada realisasi Belanja Barang dan Jasa.

Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Barang dan Jasa



Berdasarkan gambar di atas, Masing-masing kelompok pada Belanja Barang dan Jasa tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Jasa yaitu sebesar 48,59

persen dari total anggaran yang terealisasi. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 0,59 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Barang dan Jasa.

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Komposisi
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	946.380.000,00	946.380.000,00	100,00	25,17
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00	0,08
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	60.660.000,00	57.386.625,00	94,60	1,53
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	78.256.000,00	76.740.000,00	98,06	2,04
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	409.860.391,00	396.493.745,00	96,74	10,55
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	397.544.350,00	374.022.839,00	94,08	9,95
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	272.046.285,00	266.870.085,00	98,10	7,10
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	77.600.000,00	77.540.000,00	99,92	2,06
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	138.485.625,00	119.617.880,00	86,38	3,18
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	29.500.000,00	29.493.500,00	99,98	0,78
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	43.910.906,00	43.320.911,00	98,66	1,15
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	120.814.984,00	117.852.675,00	97,55	3,13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	29.900.000,00	29.900.000,00	100,00	0,80
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	156.595.514,00	155.658.147,00	99,40	4,14
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	156.862.280,00	140.249.000,00	89,41	3,73
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	916.273.000,00	910.147.900,00	99,33	24,21
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,16
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,24
Jumlah	3.852.569.335,00	3.759.553.307,00	97,59	100,00

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Barang hanya terdapat satu item belanja yaitu Belanja Barang Pakai Habis dengan realisasi sebesar Rp3.759.553.307,00 atau 97,59 persen

dari jumlah yang dianggarkan. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas merupakan belanja dengan komposisi tertinggi pada Belanja Barang yaitu sebesar Rp946.380.000,00 atau 25,17 persen dari jumlah realisasi Belanja Barang, sementara Belanja Bahan-Isi Tabung Gas merupakan belanja dengan komposisi terendah sebesar Rp2.880.000,00 atau 0,08 persen. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Bahan-Isi Tabung Gas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) adalah belanja dengan tingkat realisasi tertinggi dari anggarannya yaitu sebesar 100 persen dari jumlah anggarannya, sementara Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer adalah belanja dengan tingkat realisasi terendah yaitu sebesar Rp119.617.880,00 atau 86,38 persen dari anggarannya sebesar Rp138.485.625,00

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Dinas Bina Marga dan
Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Komposisi
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	204.300.000,00	192.650.000,00	94,30	0,56
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	97.880.000,00	97.880.000,00	100,00	0,28
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	50.175.000,00	50.175.000,00	100,00	0,15
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.449.700.000,00	6.426.435.217,00	99,64	18,63
Belanja Jasa Tenaga Ahli	498.252.500,00	489.117.350,00	98,17	1,42
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	414.108.000,00	383.150.100,00	92,52	1,11
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	192.000.000,00	192.000.000,00	100,00	0,56
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	60.000.000,00	59.953.400,00	99,92	0,17
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	238.500.000,00	228.750.000,00	95,91	0,66
Belanja Jasa Kalibrasi	128.592.320,00	115.190.000,00	89,58	0,33
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	76.600.000,00	58.600.000,00	76,50	0,17
Belanja Tagihan Telepon	2.820.000,00	1.401.344,00	49,69	0,004
Belanja Tagihan Listrik	622.516.000,00	622.516.000,00	100,00	1,80
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	17.700.000,00	12.630.000,00	71,36	0,04
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	111.722.000,00	85.315.027,00	76,36	0,25
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	146.500.000,00	123.033.300,00	83,98	0,36
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	53.700.000,00	51.456.000,00	95,82	0,15

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Komposisi
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	300.000,00	300.000,00	100,00	0,001
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.792.560.000,00	842.160.000,00	46,98	2,44
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	79.000.000,00	78.900.000,00	99,87	0,23
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.161.250,00	24.149.500,00	95,98	0,07
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	85.000.000,00	84.789.000,00	99,75	0,25
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	14.504.193.364,00	14.173.005.016,50	97,72	41,09
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	100.000.000,00	97.939.000,00	97,94	0,28
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	6.196.986.454,20	5.616.322.704,08	90,63	16,28
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	4.400.702.000,00	4.383.252.000,00	99,60	12,71
Jumlah	36.548.968.888,20	34.491.069.958,58	94,37	100,00

Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebesar 41,09 persen dari jumlah realisasi Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya sebesar 0,001 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya merupakan belanja dengan tingkat realisasi tertinggi yaitu sebesar 100 persen dari anggarannya sedangkan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang merupakan belanja dengan tingkat realisasi terendah yaitu sebesar Rp842.160.000,00 atau 46,98 persen dari anggarannya.

Tabel 5.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Komposisi
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	45.000.000,00	44.633.000,00	99,18	0,23

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Komposisi
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	504.000.000,00	501.130.000,00	99,43	2,56
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	206.700.000,00	204.057.000,00	98,72	1,04
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	87.900.000,00	66.004.500,00	75,09	0,34
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	66.571.400,00	63.280.000,00	95,06	0,32
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00	19.535.500,00	97,68	0,10
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	37.157.000,00	36.438.300,00	98,07	0,19
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	18.492.000,00	18.425.000,00	99,64	0,09
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.690.104.354,00	1.687.991.354,00	99,87	8,62
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	15.095.490.361,00	14.869.630.750,00	98,50	75,93
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	2.098.374.142,00	2.071.459.210,62	98,72	10,58
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	20.019.789.257,00	19.582.584.614,62	97,82	100,00

Pada kelompok Belanja Pemeliharaan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi sebesar 75,93 persen dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar 0,09 persen dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Belanja dengan tingkat realisasi terbesar adalah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp1.687.991.354,00 atau 99,87 persen dari anggaran sebesar Rp1.690.104.354,00, sedangkan belanja dengan tingkat realisasi terendah adalah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat

Bermotor Lainnya dan Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi yang mana tidak terealisasi dari jumlah anggarannya.

Tabel 5.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Komposisi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.040.612.602,00	12.718.763.140,00	97,53	99,88
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.160.000,00	15.160.000,00	100,00	0,12
Jumlah	13.055.772.602,00	12.733.923.140,00	97,53	100,00

Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas, komposisi tertinggi adalah Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan komposisi sebesar 99,88 persen dari jumlah realisasi Belanja Perjalanan Dinas, sedangkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota merupakan belanja dengan tingkat komposisi terendah pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar 0,12 persen dari jumlah yang terealisasi. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah belanja dengan tingkat realisasi tertinggi sebesar Rp15.160.000,00 atau 100 persen dari anggarannya, sedangkan Belanja Perjalanan Dinas Biasa adalah belanja dengan tingkat realisasi terendah sebesar Rp12.718.763.140,00 atau 97,53 persen dari anggarannya sebesar Rp13.040.612.602,00.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp419.556.600,00 atau 99,94 persen dari anggarannya sebesar Rp419.828.271,25

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	414.147.040.082,27	222.007.542.803,44

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

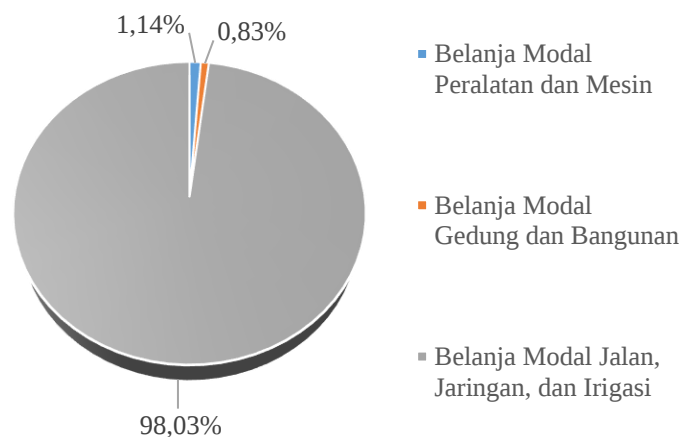
Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp414.147.040.082,27 atau 99,41 persen dari anggaran sebesar Rp416.600.194.592,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini meningkat sebesar Rp192.139.497.278,83 dari tahun 2023. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal Tahun 2024.

Tabel 5.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.780.808.865,00	4.733.709.157,00	99,01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.438.000.000,00	3.432.638.000,00	99,84
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	408.381.385.727,00	405.980.692.925,27	99,41
Jumlah	416.600.194.592,00	414.147.040.082,27	99,41

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Modal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang terdiri 3 tiga item Belanja dimana dengan tingkat realisasi tertinggi ada pada bagian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.432.638.000,00 atau 99,84 persen dari jumlah yang dianggarkan sedangkan tingkat realisasi terendah ada pada bagian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.733.709.157,00 atau 99,01 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut komposisi dari masing-masing item Belanja Modal Dinas Bina Marga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Tahun 2024 berkontribusi paling besar pada komposisi realisasi belanja modal yaitu 98,03 dari total realisasi belanja modal. Sedangkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan hanya berkontribusi sebesar 0,83 persen dari total realisasi belanja modal.

Realisasi belanja modal terdiri dari unit kerja Sekretariat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dan UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan. Realisasi belanja modal pada Sekretariat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp413.186.766.925,27 atau

99,41 persen dari anggaran sebesar Rp415.619.842.912,00. Sementara UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan terealisasi sebesar Rp960.273.157,00 atau 97,95 persen dari anggaran sebesar Rp980.351.680,00. Berikut rincian belanja modal berdasarkan unit kerja pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	
	(Rp)	(Rp)	%
Sekretariat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	415.619.842.912,00	413.186.766.925,27	99,41
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.800.457.185,00	3.773.436.000,00	99,29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.438.000.000,00	3.432.638.000,00	99,84
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	408.381.385.727,00	405.980.692.925,27	99,41
UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan	980.351.680,00	960.273.157,00	97,95
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	980.351.680,00	960.273.157,00	97,95

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.733.709.157,00	5.345.596.832,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2024 sebesar Rp4.733.709.157,00 atau 99,01 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp611.887.675,00 dari tahun 2023. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024.

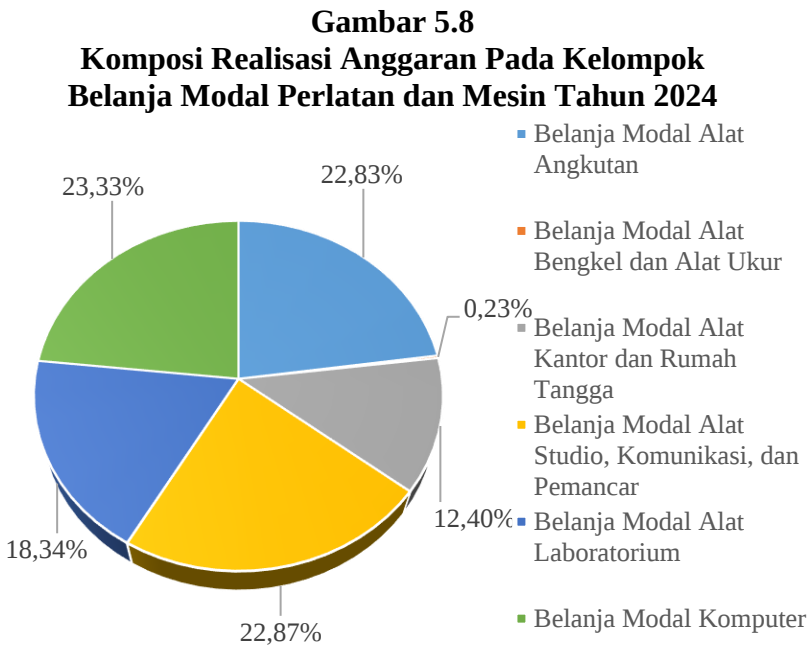
Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	
	(Rp)	(Rp)	%
Belanja Modal Alat Angkutan	1.088.161.400,00	1.080.558.000,00	99,30
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.191.140,00	11.000.000,00	98,29
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	592.173.965,00	587.185.000,00	99,16
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.085.651.150,00	1.082.700.000,00	99,73
Belanja Modal Alat Laboratorium	883.443.460,00	868.088.157,00	98,26
Belanja Modal Komputer	1.120.187.750,00	1.104.178.000,00	98,57
Jumlah	4.780.808.865,00	4.733.709.157,00	99,01

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 terdiri dari enam kelompok item Belanja dimana tingkat realisasi tertinggi dari kelompok Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dengan realisasi sebesar Rp1.082.700.000,00 atau 99,73 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp1.085.651.150,00 sementara realisasi terendah adalah Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp868.088.157,00 atau 98,26 persen dari anggaran sebesar Rp883.443.460,00.

Komposisi untuk item pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Komputer sebesar Rp1.104.178.000,00 atau 23,33 persen dari total anggaran yang terealisasi, sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp11.000.000,00 atau hanya 0,23 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Belanja Peralatan dan Mesin. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi masing-masing Belanja Modal dan Peralatan dan mesin.



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.432.638.000,00	1.168.138.000,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2024 sebesar Rp3.432.638.000,00 atau 99,84 persen dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp2.264.500.000,00 dari tahun 2023 sebesar Rp1.168.138.000,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 hanya berasal dari Belanja Modal Bangunan Gedung.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	405.980.692.925,27	215.493.807.971,44

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi untuk Tahun 2024 sebesar Rp405.980.692.925,27 atau 99,41 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp408.381.385.727,00. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 meningkat sebesar Rp190.486.884.953,83 dari tahun 2023 sebesar Rp215.493.807.971,44. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2024 hanya berasal dari Belanja Modal Jalan dan Jembatan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(501.699.746.384,47)	(327.281.609.369,79)

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 mengalami Defisit Sebesar Rp501.699.746.384,47 atau meningkat sebesar Rp174.418.137.014,68 dari tahun 2023 sebesar Rp327.281.609.369,79.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1 Aset	1.579.785.095.105,33	1.165.675.396.553,98

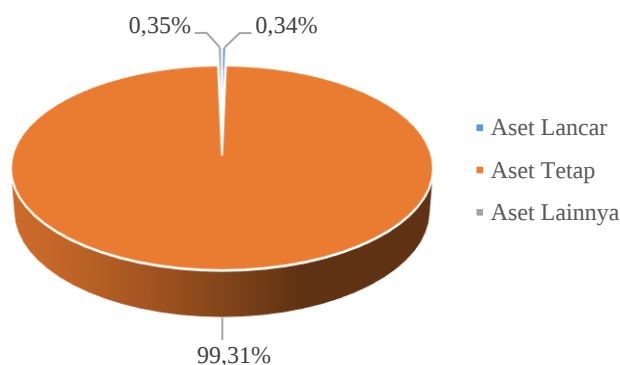
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.579.785.095.105,33, terjadi peningkatan sebesar Rp414.109.698.551,35 dari jumlah aset yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.165.675.396.553,98. Aset sendiri terdiri dari aset lancar, aset tetap, serta aset lainnya, tabel berikut menunjukkan rincian dari Aset per 31 Desember 2024.

Tabel 5.17
Rincian Aset Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)
Aset Lancar	5.367.467.694,00	5.867.509.226,50	(500.041.532,50)
Aset Tetap	1.568.917.509.930,33	1.154.185.860.446,48	414.731.649.483,85
Aset Lainnya	5.500.117.481,00	5.622.026.881,00	(121.909.400,00)
Jumlah	1.579.785.095.105,33	1.165.675.396.553,98	414.109.698.551,35

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah aset Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 berasal dari aset lancar sebesar Rp5.367.467.694,00, aset tetap sebesar Rp1.568.917.509.930,33 serta aset lainnya sebesar Rp5.500.117.481,00. Nilai aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp500.041.532,50, nilai aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp414.731.649.483,85, dan aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp121.909.400,00 dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan gambar komposisi nilai aset per 31 Desember 2024.

Gambar 5.9
Komposisi Jenis Aset per 31 Desember 2024



Gambar di atas menunjukkan bahwa aset tetap memberikan kontribusi terbesar dari seluruh total aset dalam penguasaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi mencapai 99,31 persen. Sedangkan Aset Lancar memberikan kontribusi terkecil dengan presentase hanya 0,34 persen dari total aset yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	5.367.467.694,00	5.867.509.226,50

Aset lancar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp5.367.467.694,00, jumlah tersebut mengalami penurunan dengan nilai aset lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp500.041.532,50 yang disajikan sebesar Rp5.867.509.226,50. Aset lancar per 31 Desember 2024 terdiri dari saldo persediaan dan Piutang Lainnya. Tabel berikut menunjukkan rincian aset lancar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024.

Tabel 5.18
Rincian Aset Lancar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	180.369.778,68	247.411.528,68	(67.041.750,00)
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
Persediaan	5.187.097.915,32	5.620.097.697,82	(432.999.782,50)
Jumlah	5.367.467.694,00	5.867.509.226,50	(500.041.532,50)

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Kas di Bendaharan Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Semua saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2024 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening bendahata pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2024.

Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 6053/BPKAD/2024, semua saldo kas di bendahara pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024, baik yang berupa kas tunai maupun kas bank telah disetor kembali ke rekening kas daerah per 31 Desember 2024 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Piutang Lainnya	180.369.778,68	247.411.528,68

Piutang lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp180.369.778,68 mengalami penurunan sebesar Rp67.041.750,00 dikarenakan pelunasan piutang sebesar nilai penurunan. Adapun piutang tersebut berasal dari realisasi pembayaran atas pengerjaan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp3.854.770.800,00, sedangkan progres fisik penyelesaian 72,22 persen sebesar Rp3.607.359.271,32 sehingga kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan sebesar Rp247.411.528,68. Berikut rincian pembentukan nilai piutang pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024.

Tabel 5.19
Rincian Aset Lancar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2023	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
Uang Muka Pengakuan Selisih Realisasi Pembayaran dengan Progres Fisik Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan Kalemago (Dinas Bina Marga)	247.411.528,68	0,00	0,00	67.041.750,00	180.369.778,68

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4. Persediaan	5.187.097.915,32	5.620.097.697,82

Persediaan merupakan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik (*Stock Opname*) No. 028/04/BA.SO/2025, jumlah persediaan barang pakai habis pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang provinsi sulawesi tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.187.097.915,32. Berikut disajikan rincian persediaan akhir per 31 Desember 2024.

Tabel 5.20
Rincian Persediaan Akhir Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Unit Kerja	Suku Cadang	Alat Tulis Kantor	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	Jumlah
Sekretariat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	0,00	2.350.200,00	5.133.949.551,32	5.136.299.751,32
UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan	48.411.414,00	2.386.750,00	0,00	50.798.164,00
Jumlah	48.411.414,00	4.736.950,00	5.133.949.551,32	5.187.097.915,32

Berdasarkan tabel di atas, nilai persediaan Sekretariat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp5.187.097.915,32 yang terdiri dari Alat Tulis Kantor sebesar Rp2.350.200,00 dan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp5.133.949.551,32. Nilai persediaan UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Suku Cadang sebesar Rp48.411.414,00 dan Alat Tulis Kantor sebesar Rp2.386.750,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	1.568.917.509.930,33	1.154.185.860.446,48

Aset tetap menunjukkan jumlah kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dengan usia manfaat lebih dari satu tahun yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai aset tetap pada Neraca dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Nilai perolehan aset tetap pada Tahun 2024 sebesar Rp3.146.367.931.540,08 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.577.450.421.609,75 menghasilkan nilai buku sebesar Rp1.568.917.509.930,33. Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2024 meningkat sebesar Rp434.576.077.639,85 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian aset tetap

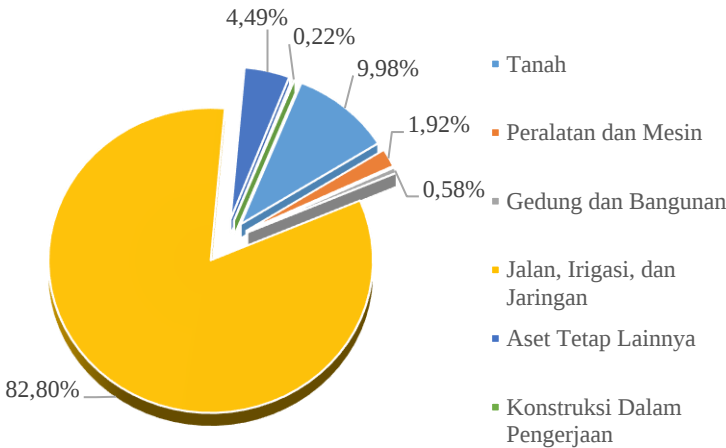
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.21
Aset Tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	314.102.942.577,00	314.102.942.577,00	0,00
Peralatan dan Mesin	60.454.790.309,00	55.706.092.566,00	4.748.697.743,00
Gedung dan Bangunan	18.312.941.754,00	13.009.584.400,00	5.303.357.354,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.605.089.863.120,81	2.183.958.634.109,88	421.131.229.010,93
Aset Tetap Lainnya	141.399.482.764,77	15.547.778.611,00	125.851.704.153,77
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.007.911.014,50	129.466.821.636,35	(122.458.910.621,85)
Nilai Perolehan	3.146.367.931.540,08	2.711.791.853.900,23	434.576.077.639,85
Akumulasi Penyusutan	(1.577.450.421.609,75)	(1.557.605.993.453,75)	(19.844.428.156,00)
Nilai Buku	1.568.917.509.930,33	1.154.185.860.446,48	414.731.649.483,85

Berdasarkan tabel di atas Aset Tetap Tanah tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, Aset Tetap Peralatan Dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp4.748.697.743,00, Aset Tetap Gedung Dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp5.303.357.354,00, Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp421.131.229.010,93, Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp125.851.704.153,77 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan mengalami penurunan sebesar Rp122.458.910.621,85 dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan kontribusi jenis aset tetap terhadap total aset tetap berdasarkan nilai perolehan.

Gambar 5.10
Komposisi Jenis Aset Tetap per 31 Desember 2024



Berdasarkan Gambar di atas aset tetap jalan, irigasi dan jaringan merupakan jenis aset tetap yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 82,80 persen dari total Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan memberikan kontribusi terkecil yaitu sebesar 0,22 persen dari total Aset Tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2024, terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap (barang ekstrakompatabel) yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi tengah. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.22
Rincian Rekap Ekstrakompatabel Aset Tetap
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Jenis Aset	Ekstra s/d 2023	Mutasi Ekstra		Ekstra s/d 2024
		Debit	Kredit	
Peralatan dan Mesin	56.745.590,00	0,00	0,00	56.745.590,00
Gedung dan Bangunan	65.377.000,00	0,00	0,00	65.377.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	122.122.590,00	0,00	0,00	122.122.590,00

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024 barang ekstrakompatabel tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai barang ekstrakompatabel tahun 2023. Rincian barang ekstrakompatabel terlampir pada lampiran barang ekstrakompatabel.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Tanah	314.102.942.577,00	314.102.942.577,00

Jumlah aset tetap – tanah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp314.102.942.577,00. Adapun rincian aset tetap tanah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang hanya berupa tanah bangunan perumahan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	60.454.790.309,00	55.706.092.566,00

Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp60.454.790.309,00. Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.748.697.743,00 dari nilai aset tetap – peralatan dan

mesin per 31 Desember 2023 yang disajikan sebesar Rp55.706.092.566,00. Berikut disajikan rincian aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2024.

Tabel 5.23
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Per 31 Desember 2024

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)
Alat Besar	21.905.812.445,00	21.905.812.445,00	0,00
Alat Angkutan	13.097.769.550,00	12.017.211.550,00	1.080.558.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.751.590.562,00	1.725.590.562,00	26.000.000,00
Alat Pertanian	19.734.000,00	19.734.000,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.406.038.303,00	5.636.253.303,00	769.785.000,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.375.265.054,00	1.422.165.054,00	953.100.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	28.759.000,00	28.759.000,00	0,00
Alat Laboratorium	7.056.060.817,00	6.236.384.074,00	819.676.743,00
Komputer	7.738.008.578,00	6.638.430.578,00	1.099.578.000,00
Alat Pengeboran	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
Rambu - Rambu	71.552.000,00	71.552.000,00	0,00
Jumlah	60.454.790.309,00	55.706.092.566,00	4.748.697.743,00

Tabel di atas menunjukkan sebelas jenis aset tetap – peralatan dan mesin dimana peralatan computer merupakan jenis aset tetap dengan kenaikan paling signifikan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada kelompok aset tetap - peralatan dan mesin. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – peralatan dan mesin selama tahun 2024.

Tabel 5.24
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	55.706.092.566,00
Mutasi Bertambah	
<i>Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	4.733.709.157,00
<i>Kapitalisasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin</i>	63.400.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	4.797.109.157,00
Mutasi Berkurang	
<i>Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap</i>	48.411.414,00
Jumlah Mutasi Berkurang	48.411.414,00
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	60.454.790.309,00

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mutasi bertambah sebesar Rp4.797.109.157,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp48.411.414,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mutasi bertambah yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.733.709.157,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.25
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Nilai Belanja Modal
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	864.688.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	215.870.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	11.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	32.600.000,00
Belanja Modal Mebel	307.200.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	148.600.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	93.785.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	101.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	981.700.000,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	868.088.157,00
Belanja Modal Personal Computer	782.900.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.950.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	265.328.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	52.000.000,00
Jumlah	4.733.709.157,00

- b. Mutasi bertambah yang berasal dari kapitalisasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin sebesar Rp63.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26
Rincian kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Bina Marga dan
Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

No. SP2D	Nilai
72.00/04.0/000831/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	20.400.000,00
72.00/04.0/000281/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	28.000.000,00
72.00/04.0/000536/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	15.000.000,00
Nilai Kapitalisasi	63.400.000,00

- c. Mutasi berkurang yang berasal dari Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin sebesar Rp 48.411.414,00 yang berasal dari Alat Laboratorium Lainnya menjadi bahan persediaan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	18.312.941.754,00	13.009.584.400,00

Jumlah aset tetap – gedung dan bangunan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp18.312.941.754,00. Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp5.303.357.354,00 dari nilai aset tetap – gedung dan bangunan yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.009.584.400,00. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – gedung dan bangunan selama tahun 2024.

Tabel 5.27
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	13.009.584.400,00
Mutasi Bertambah	
<i>Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	3.432.638.000,00
<i>Kapitalisasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan</i>	1.870.719.354,00
Jumlah Mutasi Bertambah	5.303.357.354,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	18.312.941.754,00

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp5.303.357.354,00, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Mutasi bertambah berasal dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.432.638.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.28
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Nilai Belanja Modal
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.937.814.000,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	197.046.000,00
Belanja Modal Bangunan Terbuka	99.236.000,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	198.542.000,00
Jumlah	3.432.638.000,00

- b. Mutasi bertambah berasal dari kapitalisasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.870.719.354,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.29
Rincian Kapitalisasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Dinas Bina Marga dan
Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

No. SP2D	Nilai
72.00/04.0/000333/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	19.587.800,00
72.00/04.0/000908/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	78.351.200,00
72.00/04.0/000910/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	84.789.000,00
72.00/04.0/000120/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	179.504.354,00
72.00/04.0/000454/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	59.298.300,00
72.00/04.0/000799/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	138.362.700,00
72.00/04.0/000905/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	24.781.000,00
72.00/04.0/000342/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	366.060.000,00
72.00/04.0/000502/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024	430.730.300,00
72.00/04.0/000918/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	423.409.700,00
72.00/04.0/000500/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024	65.845.000,00
Nilai Kapitalisasi	1.870.719.354,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.605.089.863.120,81	2.183.958.634.109,88

Jumlah aset tetap – jalan, jaringan dan irigasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp2.605.089.863.120,81. Nilai aset tetap – jalan, jaringan dan irigasi mengalami peningkatan sebesar Rp421.131.229.010,93 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.

Tabel 5.30
Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Jalan Jembatan	2.602.176.641.970,81	2.181.045.412.959,88	421.131.229.010,93
Bangunan Air	1.260.346.000,00	1.260.346.000,00	0,00
Instalasi	1.652.875.150,00	1.652.875.150,00	0,00
Jumlah	2.605.089.863.120,81	2.183.958.634.109,88	421.131.229.010,93

Tabel di atas menunjukkan kenaikan aset tetap - jalan, irigasi dan jaringan terjadi pada jalan jembatan sebesar Rp421.131.229.005,93 pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2024.

Tabel 5.31
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah
Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023	2.183.958.634.109,88
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	405.980.692.925,27
Kapitalisasi Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.495.267.219,08
Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan ke Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi	111.586.677.890,85
Koreksi Ekuitas	5,00
Jumlah Mutasi Bertambah	530.062.638.040,20
Mutasi Berkurang	
Reklasifikasi ke Aset Tetap dalam Renovasi	108.931.409.029,27
Jumlah Mutasi Berkurang	108.931.409.029,27
Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024	2.605.089.863.120,81

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 sebesar Rp530.062.638.040,20 dan mutasi berkurang sebesar Rp108.931.409.029,27 pada aset tetap – jalan, jaringan dan irigasi dengan rincian sebagai berikut.

- a. Mutasi bertambah yang berasal dari Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp405.980.692.925,27.

Tabel 5.32
Rincian Belanja Modal Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Nilai Belanja Modal
Belanja Modal Jalan Provinsi	400.608.232.466,27
Belanja Modal Jalan Lainnya	197.936.000,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	5.174.524.459,00
Jumlah	405.980.692.925,27

- b. Mutasi bertambah yang berasal dari Kapitalisasi Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp12.495.267.219,08 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.33
Rincian Kapitalisasi Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

No. SP2D	Nilai
72.00/04.0/000017/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	120.341.569,08
72.00/04.0/000215/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	163.001.025,00
72.00/04.0/000318/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024	156.059.686,00

No. SP2D	Nilai
72.00/04.0/000508/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024	128.633.651,00
72.00/04.0/000061/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	92.824.860,00
72.00/04.0/000018/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	87.591.654,00
72.00/04.0/000124/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	85.877.118,00
72.00/04.0/000303/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	121.542.047,00
72.00/04.0/000484/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	7.362.431,00
72.00/04.0/000789/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	99.300.000,00
72.00/04.0/000569/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	99.800.000,00
72.00/04.0/000523/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024	99.123.000,00
72.00/04.0/000780/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	99.220.000,00
72.00/04.0/000015/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	42.256.989,60
72.00/04.0/000103/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	95.002.798,00
72.00/04.0/000317/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024	74.025.160,40
72.00/04.0/000066/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	19.835.700,00
72.00/04.0/000353/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	55.567.155,00
72.00/04.0/000181/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	299.988.045,00
72.00/04.0/000358/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	360.024.060,00
72.00/04.0/000532/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	479.942.910,00
72.00/04.0/000873/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	359.985.210,00
72.00/04.0/000570/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	99.000.000,00
72.00/04.0/000216/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	91.188.997,00
72.00/04.0/000250/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	89.088.156,00
72.00/04.0/000357/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	74.217.967,00
72.00/04.0/000639/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	76.679.392,00
72.00/04.0/000631/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	99.567.000,00
72.00/04.0/000107/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	19.837.920,00
72.00/04.0/000441/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	78.102.930,00
72.00/04.0/000606/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	99.625.000,00
72.00/04.0/000176/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	19.869.000,00
72.00/04.0/000882/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	76.312.500,00
72.00/04.0/000583/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	99.700.000,00
72.00/04.0/000140/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	18.480.390,00
72.00/04.0/000403/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	73.588.560,00
72.00/04.0/000193/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	191.545.762,00
72.00/04.0/000442/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	229.854.915,00
72.00/04.0/000788/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	306.473.220,00
72.00/04.0/000876/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	229.854.915,00
72.00/04.0/000718/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	99.465.000,00
72.00/04.0/000132/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	19.802.400,00
72.00/04.0/000488/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	78.876.600,00
72.00/04.0/000182/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	215.775.397,00
72.00/04.0/000359/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	258.920.820,00
72.00/04.0/000533/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	345.233.310,00
72.00/04.0/000875/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	258.947.460,00
72.00/04.0/000402/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	65.823.000,00
72.00/04.0/000779/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	99.500.000,00
72.00/04.0/000171/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	84.770.700,00

No. SP2D	Nilai
72.00/04.0/000460/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	125.752.706,00
72.00/04.0/000697/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	212.997.094,00
72.00/04.0/000378/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	99.822.300,00
72.00/04.0/000571/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	99.500.000,00
72.00/04.0/000754/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	99.012.000,00
72.00/04.0/000016/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	96.097.402,05
72.00/04.0/000220/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	126.169.215,00
72.00/04.0/000319/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024	123.404.122,00
72.00/04.0/000534/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	134.150.270,95
72.00/04.0/000184/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	76.725.697,00
72.00/04.0/000459/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	81.524.542,00
72.00/04.0/000470/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	125.057.854,00
72.00/04.0/000844/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	100.302.542,00
72.00/04.0/000383/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	99.678.000,00
72.00/04.0/000385/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	99.567.000,00
72.00/04.0/000113/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	19.869.000,00
72.00/04.0/000375/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	79.143.000,00
72.00/04.0/000604/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	99.465.000,00
72.00/04.0/000110/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	19.842.360,00
72.00/04.0/000474/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	79.036.440,00
72.00/04.0/000372/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	99.877.800,00
72.00/04.0/000752/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	98.975.000,00
72.00/04.0/000183/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	72.000.000,00
72.00/04.0/000447/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	140.022.985,00
72.00/04.0/000684/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	147.644.154,00
72.00/04.0/000785/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	99.300.000,00
72.00/04.0/000060/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	19.871.220,00
72.00/04.0/000292/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	79.484.880,00
72.00/04.0/000931/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	62.654.810,00
72.00/04.0/000607/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	99.250.000,00
72.00/04.0/000782/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	94.510.000,00
72.00/04.0/000757/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	99.175.000,00
72.00/04.0/000527/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	99.067.500,00
72.00/04.0/000932/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	74.953.000,00
72.00/04.0/000783/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	99.475.000,00
72.00/04.0/000756/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	98.725.000,00
72.00/04.0/000784/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	94.275.000,00
72.00/04.0/000753/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	98.930.000,00
72.00/04.0/000371/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	99.567.000,00
72.00/04.0/000384/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	99.622.500,00
09491/SP2D-LS/BPKAD/2023	303.251.334,00
13620/SP2D-LS/BPKAD/2023	363.901.600,80
23760/SP2D-LS/BPKAD/2023	394.226.734,20
72.00/04.0/000581/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	454.877.001,00
72.00/04.0/000605/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	99.475.000,00
72.00/04.0/000058/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	97.738.275,00
72.00/04.0/000930/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	63.714.000,00

No. SP2D	Nilai
72.00/04.0/000702/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	98.000.000,00
72.00/04.0/000456/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	98.179.500,00
Nilai Kapitalisasi	12.495.267.219,08

- c. Mutasi bertambah berasal dari Reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan ke Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp111.586.677.890,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.34
Rincian Reklasifikasi ke Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Uraian	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak
Belanja Modal Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Ruas Siuna-boalemo (MYC)	622/987/SP-ADDAKH/DIS.BMPR	32.690.173.751,00
Belanja Modal Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Ruas Air Terang - Momunu (MYC)	622/1469/SP-ADD2/DIS.BMPR	14.041.572.725,00
Belanja Modal Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Ruas Salakan - Sambiut (MYC)	622/690/SP-ADD/DIS.BMPR	11.219.037.749,00
Belanja Modal Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Ruas Beteleme-Bts. Sulsel (Nuha) (MYC)	622/733/SP-ADDAKH/DIS.BMPR	11.296.869.250,00
Rekonstruksi Jalan Ruas Pasir Putih (Bts. Kab. Parigi Moutong)-Basi	622/685/SP-DIS.BMPR	2.788.570.150,00
Jalan Mepanga - Pasir Putih - Basi, Kab. Parigi Moutong dan kab. Tolitoli	622-SP-WAS-10-VII-MPP-Bid.Bintek/2023	417.387.380,00
Belanja Modal Paket Rekonstruksi Jalan Ruas Tonusu-Pendolo (MYC)	622-035/ADD-FNL/MYC/TNS-PDL/XII/2024	23.837.653.754,00
Belanja Modal Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Ruas Beteleme-Bts. Sulsel (Nuha) (MYC)	630/132/SP-ADD/DIS.BMPR	9.734.161.320,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Ruas Jalan Siuna - Boalemo (MYC)	622-19.12.1/WAS/Add-Akhir/Bid.Bintek	599.110.994,85
Belanja Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Ruas Jalan Air Terang - Momunu (MYC)	622-19.12.1/WAS/Add-Akhir/Bid.Bintek	617.495.910,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawasan Teknis Ruas Jln Salakan-Sambiut (MYC)	622-29.11.2/WAS/Add-Akhir/Bid.Bintek	702.324.333,00
Pengawasan Teknis Ruas Jalan Beteleme - Nuha (Bts. Sulsel)	622-13.12.1/WAS/Add-Akhir/Bid.Bintek	596.119.957,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Ruas Jalan Tonusu - Pendolo (MYC)	622-29.11.1/WAS/Add-Akhir/Bid.Bintek	664.105.496,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Pekerjaan Penyusunan Dokumen Fs Ruas Jalan Tambu-Kasimbar CS	622/02/REN/Bid.Bintek/2022	2.382.095.121,00
Jumlah		111.586.677.890,85

- d. Mutasi bertambah yang berasal dari koreksi ekuitas terhadap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp5,00

- e. Mutasi berkurang yang berasal dari Reklasifikasi ke Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp108.931.409.029,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.35
Rincian Reklasifikasi ke Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Uraian	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak
Belanja Modal Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Tongoa-Lembah Tongoa	622/170/SPK-BID.JJBT	2.940.621.000,00
Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Bora - Pandere (MYC)	622/1845/SP-ADD/DIS.BMPR	52.883.841.129,27
Belanja Modal Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Ruas Boneoge-Towale	622/534/SP-ADD/DIS.BMPR	5.718.231.600,00
Belanja Modal Pembangunan Jalan Ruas Porame (Kec. Marawola) - Uemanje (Kec. Kinovaro)	622/840/ADD II/PEMB-PU/BID.JJBT	3.449.539.300,00
Belanja Modal Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Uemanje - Dombu (Dombu - Ungolero)	622/234/SP-DIS.BMPR	3.243.789.000,00
Belanja Modal Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Kilo – Sipatokong	622/184/SPK-BID.JJBT	2.500.794.000,00
Belanja Modal Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Tinakin Darat – Mato	622/1140/SP-ADD/DIS.BMPR	6.252.540.000,00
Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Dombu-Wugaga (Dombu-Pinembani)	622/1376/SP-ADD/DIS.BMPR	4.820.129.000,00
Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Doda – Lelio	622/256/SP-DIS.BMPR	4.815.377.000,00
Belanja Modal Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Desa Lombok - Taipa Obal	622/716/SP-ADD/DIS.BMPR	4.154.916.000,00
Belanja Modal Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Ruas Paranonge-Linte	622/680/SP-ADD/DIS.BMPR	7.836.800.000,00
Belanja Modal Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Marawola - Kinavaro (Segmen Rondingo - Panasibaja)	622/1987/SP-ADD/DIS.BMPR	2.447.000.000,00
Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Marawola-Kinovaro (Segmen Ongulero-Panasibaja)	622/1874/SP-KPJ/DIS.BMPR	2.290.000.000,00
Belanja Modal Paket Pembangunan Jalan Ruas Tentena – Korobono	622/970/SPK-ADD1/DIS.BMPR	5.577.831.000,00
Jumlah		108.931.409.029,27

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
4. Aset Tetap Lainnya	141.399.482.764,77	15.547.778.611,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang baik. Jumlah aset tetap lainnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2024 disajikan sebesar

Rp141.399.482.764,77. Aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp125.851.704.153,77 dari tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp15.547.778.611,00. Berikut rincian Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.36
Rincian Aset Tetap Lainnya
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Bahan Perpustakaan	4.453.968.111,00	4.453.968.111,00	0,00
Tanaman	537.928.000,00	537.928.000,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	136.407.586.653,77	10.555.882.500,00	125.851.704.153,77
Jumlah	141.399.482.764,77	15.547.778.611,00	125.851.704.153,77

Tabel di atas menunjukkan aset tetap dalam renovasi mengalami kenaikan sebesar Rp125.851.704.153,77 pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – aset tetap lainnya selama tahun 2024.

Tabel 5.37
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023	15.547.778.611,00
Mutasi Bertambah	
<i>Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya</i>	6.048.062.393,50
<i>Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya</i>	10.872.232.731,00
<i>Reklasifikasi antar KIB</i>	108.931.409.029,27
Jumlah Mutasi Bertambah	125.851.704.153,77
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	141.399.482.764,77

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi bertambah pada aset tetap lainnya sebesar Rp125.851.704.153,77 pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut.

- a. Mutasi bertambah yang berasal dari kapitalisasi aset tetap lainnya sebesar Rp6.048.062.393,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.38
Rincian Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

No. SP2D	Nilai
72.00/04.0/000174/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	223.861.192,00
72.00/04.0/000349/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	268.653.300,00
72.00/04.0/000590/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	358.182.570,00
72.00/04.0/000880/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	268.608.899,00
72.00/04.0/000196/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	134.769.262,00
72.00/04.0/000401/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	161.730.108,00
72.00/04.0/000874/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	377.346.941,50
72.00/04.0/000172/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	113.988.952,00
72.00/04.0/000316/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024	113.072.592,00
72.00/04.0/000471/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	142.956.678,00
72.00/04.0/000712/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	140.671.669,00
72.00/04.0/000838/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	61.357.107,00
72.00/04.0/000781/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	94.225.000,00
72.00/04.0/000105/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	18.158.490,00
72.00/04.0/000416/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	72.633.960,00
72.00/04.0/000579/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	99.012.000,00
72.00/04.0/000549/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	98.613.954,00
72.00/04.0/000883/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	97.657.800,00
72.00/04.0/000111/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	19.802.400,00
72.00/04.0/000476/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	78.943.200,00
72.00/04.0/000122/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	19.846.800,00
72.00/04.0/000515/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024	79.054.200,00
72.00/04.0/000194/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	137.646.382,00
72.00/04.0/000386/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	165.175.659,00
72.00/04.0/000878/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	385.409.871,00
72.00/04.0/000755/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	96.841.950,00
72.00/04.0/000192/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	137.724.082,00
72.00/04.0/000419/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	165.268.899,00
72.00/04.0/000877/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	385.627.431,00
72.00/04.0/000195/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	266.579.709,00
72.00/04.0/000443/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	319.883.796,00
72.00/04.0/000879/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	746.435.040,00
72.00/04.0/000529/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	99.622.500,00
72.00/04.0/000758/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	98.700.000,00
Nilai Kapitalisasi	6.048.062.393,50

- b. Mutasi bertambah yang berasal dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp108.931.409.029,27 dengan rincian pada penjelasan Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi
- c. Mutasi bertambah yang berasal dari Konstruksi dalam pengerjaan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp10.872.232.731,00 dengan nomor SP2D 00215/SP2D-

LS/BPKAD/2023 sebesar Rp5.906.872.730,00 dan nomor SP2D 17480/SP2D-LS/BPKAD/2023 sebesar Rp4.965.360.001,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.007.911.014,50	129.466.821.636,35

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.007.911.014,50, menurun sebesar Rp122.458.910.621,85 dari tahun sebelumnya. Adapun penyebab menurunnya nilai Konstruksi dalam pengerjaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.39
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah
Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023	129.466.821.636,35
Mutasi Bertambah	
Jumlah Mutasi Bertambah	0,00
Mutasi Berkurang	
<i>Reklasifikasi ke Aset Tetap Dalam Renovasi</i>	10.872.232.731,00
<i>Reklasifikasi ke Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi</i>	111.586.677.890,85
Jumlah Mutasi Berkurang	122.458.910.621,85
Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024	7.007.911.014,50

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6. Akumulasi Penyusutan	1.577.450.421.609,75	1.557.605.993.453,75

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2024. Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan pada akumulasi penyusutan yaitu sebesar Rp19.844.428.156,00. Berikut rincian serta mutasi Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 yaitu:

Tabel 5.40
Rincian Akumulasi Penyusutan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan tahun 2024	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2024
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	42.972.572.038,00	152.101.787,00	4.450.104.045,00	47.574.777.870,00
Gedung dan Bangunan	3.582.369.041,00	289.758,00	255.958.152,00	3.838.616.951,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.510.822.341.586,75	(120.283.244.191,00)	133.855.579.243,00	1.524.394.676.638,75
Aset Tetap Lainnya	228.710.788,00	0,00	1.413.639.362,00	1.642.350.150,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.557.605.993.453,75	(120.130.852.646,00)	139.975.280.802,00	1.577.450.421.609,75

Pada tabel di atas, Akumulasi penyusutan mengalami penurunan dikarenakan adanya penambahan nilai dari beban penyusutan sebesar Rp139.975.280.802,00 dan koreksi ekuitas berkurang sebesar Rp120.130.852.646,00 sehingga membentuk nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.577.450.421.609,75. Akumulasi Penyusutan pada dasarnya mengurangi nilai perolehan dari masing-masing aset tetap sehingga adapun nilai buku masing-masing aset per 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.41
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	314.102.942.577,00	0,00	314.102.942.577,00
Peralatan dan Mesin	60.454.790.309,00	(47.574.777.870,00)	12.880.012.439,00
Gedung dan Bangunan	18.312.941.754,00	(3.838.616.951,00)	14.474.324.803,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.605.089.863.120,81	(1.524.394.676.638,75)	1.080.695.186.482,06
Aset Tetap Lainnya	141.399.482.764,77	(1.642.350.150,00)	139.757.132.614,77
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.007.911.014,50	0,00	7.007.911.014,50
Jumlah	3.146.367.931.540,08	(1.577.450.421.609,75)	1.568.917.509.930,33

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat harga perolehan aset tetap sebelum dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp3.146.367.931.540,08 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.577.450.421.609,75 sehingga diperoleh nilai buku aset

tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.568.917.509.930,33.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	5.500.117.481,00	5.622.026.881,00

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Jumlah Aset lainnya yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.500.117.481,00. Nilai aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp121.909.400,00 dari tahun sebelumnya. Berikut rincian mutasi pada Aset Lainnya.

Tabel 5.42
Rincian Mutasi Aset Lainnya
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah
Nilai Perolehan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023	42.224.706.342,00
Mutasi Bertambah	
Jumlah Mutasi Bertambah	0,00
Mutasi Berkurang	
Penghapusan Aset Lain-Lain	970.124.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	970.124.000,00
Nilai Perolehan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024	41.254.582.342,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024	(35.754.464.861,00)
Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2024	5.500.117.481,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi berkurang pada Aset Lainnya yang berasal dari penghapusan Aset Lain sebesar Rp970.124.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.43
Rincian penghapusan Aset Lainnya
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Uraian	Tahun Perolehan	No SK	Jumlah
Bangunan Gudang tertutup permanen	1977	814/252.22/BPKAD	55.700.000,00
Jembatan Ruas Jalan Kalawara - Kulawi	1995	032/151.07/BPKAD	43.344.000,00
Jembatan Ruas Jalan Kalawara - Kulawi	1978	000.2.4/215/BPKAD/2024	871.080.000,00
Jumlah			970.124.000,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.2 Kewajiban	61.406.576,00	62.002.571,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kewajiban di tahun 2024 sebesar Rp61.406.576,00, yang merupakan utang belanja di tahun 2024

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima atau dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Adapun utang belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 sebesar Rp61.406.576,00. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.44
Rincian Utang Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Jenis Rekening	Nomor Tagihan	Nilai
Listrik	312100150262	58.150.022,00
Listrik	312100167214	97.188,00
Listrik	312100147311	301.617,00
Listrik	312101233400	1.883.499,00
Internet	172705213287	974.250,00
Jumlah		61.406.576,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.3 Ekuitas	1.458.653.365.609,33	1.165.613.393.982,98

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Nilai ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.458.653.365.609,33 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.165.675.396.553,98 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp293.039.971.626,35.

5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO serta Surplus/Defisit Operasional. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima

atau dibayar. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2024. Penjelasan mengenai akun-akun Laporan Operasional tahun anggaran 2024 sebagai berikut.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1 Pendapatan LO	3.119.528.200,00	5.773.806.834,00

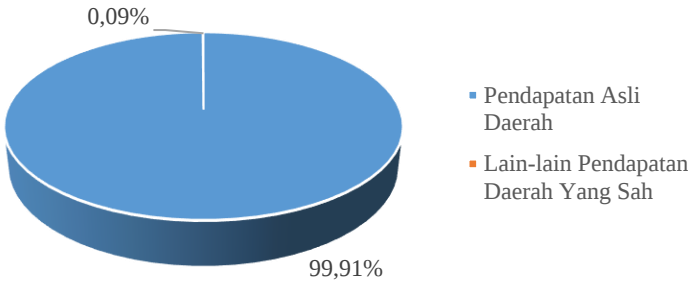
Pendapatan–LO adalah hak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 disajikan sebesar Rp3.119.528.200,00. Nilai pendapatan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.654.278.634,00 atau 45,97 persen dari nilai pendapatan tahun 2023. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut.

Tabel 5.45
Rincian Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Jenis Pendapatan	Laporan Operasional	Laporan Realisasi Anggaran	Selisih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	3.116.778.200,00	3.116.778.200,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.750.000,00	69.791.750,00	(67.041.750,00)
Jumlah	3.119.528.200,00	3.186.569.950,00	(67.041.750,00)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih antara Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA. Pendapatan Asli Daerah dikarenakan penurunan nilai Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp67.041.750,00 yang telah dibayarkan pada tahun berjalan. Pendapatan Asli Daerah merupakan komposisi tertinggi pada Pendapatan – LO yaitu sebesar 99,91 persen, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah hanya berkontribusi sebesar 0,09 persen. Berikut rincian komposisi Pendapatan LO.

Gambar 5.11
Komposisi Jenis Pendapatan LO Tahun 2024



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah (LO)	3.119.528.200,00	3.121.868.608,00

Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Saldo pendapatan asli daerah pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.340.408,00 atau 0,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian pendapatan asli daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang tahun 2024.

Tabel 5.46
Rincian Pendapatan Asli Daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Jenis Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Retribusi Daerah-LO	3.116.778.200,00	3.119.868.608,00	(3.090.408,00)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	2.750.000,00	2.000.000,00	750.000,00
Jumlah	3.119.528.200,00	3.121.868.608,00	(2.340.408,00)

Berdasarkan tabel di atas pendapatan asli daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruanga Tahun 2024 terdiri dari retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Retribusi daerah disajikan sebesar Rp3.116.778.200,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp3.090.408,00 dari tahun sebelumnya dan Lain-lain pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp750.000,00 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO	0,00	2.651.938.226,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.651.938.226,00 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2 Beban	211.779.302.958,12	239.247.282.290,75

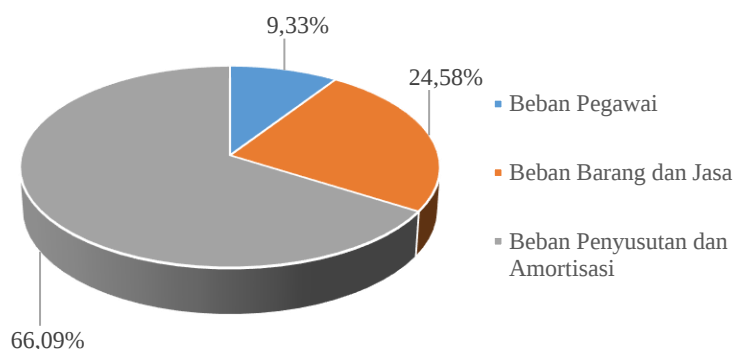
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah beban mengalami penurunan pada Tahun 2024 sebesar Rp27.467.979.332,63 sehingga didapatkan jumlah beban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yaitu sebesar Rp211.779.302.958,12. Berikut ini rincian beban pada Tahun 2024 dan 2023.

Tabel 5.47
Rincian Beban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beban Pegawai	19.752.588.632,00	19.127.165.135,00	625.423.497,00
Beban Barang dan Jasa	52.051.433.524,12	82.975.678.418,00	(30.924.244.893,88)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	139.975.280.802,00	137.144.438.737,75	2.830.842.064,25
Jumlah	211.779.302.958,12	239.247.282.290,75	(27.467.979.332,63)

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024, jika dibandingkan tahun sebelumnya peningkatan terbesar terjadi pada Beban Pegawai sebesar Rp625.423.497,00 atau 3,27 persen dari tahun sebelumnya dan Beban Penyusutan dan Amortisasi yaitu sebesar Rp2.830.842.064,25 atau 2,06 persen dari tahun sebelumnya sementara Beban Barang dan Jasa menurun sebesar Rp30.924.244.893,88 atau 37,27 persen dari tahun sebelumnya. Berikut komposisi masing-masing jenis beban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.12
Komposisi Jenis Beban Tahun 2024



Berdasarkan Gambar di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024, yaitu Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar 66,09 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Pegawai sebesar 9,33 persen dari total Beban pada Tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Beban Pegawai	19.752.588.632,00	19.127.165.135,00

Beban pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp625.423.497,00 atau 3,27 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, berikut rincian beserta komposisi beban pegawai Tahun 2024 :

Tabel 5.48
Rincian Beban Pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Gaji Pokok PNS	10.005.799.512,00	10.005.799.512,00	0,00	50,66
Beban Tunjangan Keluarga PNS	970.360.564,00	970.360.564,00	0,00	4,91
Beban Tunjangan Jabatan PNS	258.300.000,00	258.300.000,00	0,00	1,31
Beban Tunjangan Fungsional PNS	709.900,00	709.900,00	0,00	0,004
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	401.795.000,00	401.795.000,00	0,00	2,03
Beban Tunjangan Beras PNS	519.396.240,00	519.396.240,00	0,00	2,63
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.236.295,00	8.236.295,00	0,00	0,04
Beban Pembulatan Gaji PNS	127.859,00	127.859,00	0,00	0,001
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.026.063.262,00	6.026.063.262,00	0,00	30,51
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,30

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.456.080.000,00	1.456.080.000,00	0,00	7,37
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	36.720.000,00	36.720.000,00	0,00	0,2
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,05
Jumlah	19.752.588.632,00	19.752.588.632,00	0,00	100,00

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 yaitu Beban Gaji Pokok PNS yaitu sebesar 50,66 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Pembulatan Gaji PNS yaitu sebesar 0,001 persen. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realisasi belanja pegawai pada Tahun 2024 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Berdasarkan tabel di atas tidak terdapat selisih antara beban dan belanja.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	52.051.433.524,12	82.975.678.418,00

Beban barang dan jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 sebesar Rp52.051.433.524,12. Beban barang dan jasa di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp30.924.244.893,88 atau turun 37,27 persen dari nilai beban barang dan jasa tahun 2023. Tabel berikut menunjukkan rincian perbandingan beban dan belanja barang dan jasa tahun 2024.

Tabel 5.49
Rincian beban dan belanja barang dan jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	946.380.000,00	946.380.000,00	0,00	1,82
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,006
Beban Bahan-Bahan Lainnya	42.386.625,00	57.386.625,00	15.000.000,00	0,08
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	48.740.000,00	76.740.000,00	28.000.000,00	0,09
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	393.396.557,50	396.493.745,00	3.097.187,50	0,76
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	374.022.839,00	374.022.839,00	0,00	0,72

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	266.870.085,00	266.870.085,00	0,00	0,51
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	77.540.000,00	77.540.000,00	0,00	0,15
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	119.617.880,00	119.617.880,00	0,00	0,23
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	29.493.500,00	29.493.500,00	0,00	0,06
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	43.320.911,00	43.320.911,00	0,00	0,08
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	117.852.675,00	117.852.675,00	0,00	0,23
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,06
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	135.258.147,00	155.658.147,00	20.400.000,00	0,26
Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	624.757.384,00	140.249.000,00	(484.508.384,00)	1,20
Beban Makanan dan Minuman Rapat	910.147.900,00	910.147.900,00	0,00	1,75
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,01
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,02
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	192.650.000,00	192.650.000,00	0,00	0,37
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	97.880.000,00	97.880.000,00	0,00	0,19
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	50.175.000,00	50.175.000,00	0,00	0,1
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.426.435.217,00	6.426.435.217,00	0,00	12,35
Beban Jasa Tenaga Ahli	489.117.350,00	489.117.350,00	0,00	0,94
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	383.150.100,00	383.150.100,00	0,00	0,74
Beban Jasa Tenaga Keamanan	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,37
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	59.953.400,00	59.953.400,00	0,00	0,12
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	228.750.000,00	228.750.000,00	0,00	0,44
Beban Jasa Kalibrasi	115.190.000,00	115.190.000,00	0,00	0,22
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,11

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Tagihan Telepon	1.276.232,00	1.401.344,00	125.112,00	0,002
Beban Tagihan Listrik	629.125.867,00	622.516.000,00	(6.609.867,00)	1,21
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.630.000,00	12.630.000,00	0,00	0,02
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	78.234.277,00	85.315.027,00	7.080.750,00	0,15
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	123.033.300,00	123.033.300,00	0,00	0,24
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	51.456.000,00	51.456.000,00	0,00	0,10
Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0006
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	842.160.000,00	842.160.000,00	0,00	1,62
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	0,15
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.149.500,00	24.149.500,00	0,00	0,05
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	84.789.000,00	84.789.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	137.031.159,42	14.173.005.016,50	14.035.973.857,08	0,26
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	97.939.000,00	97.939.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.170.346.617,58	5.616.322.704,08	3.445.976.086,50	4,17
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	4.383.252.000,00	4.383.252.000,00	0,00	8,42
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	44.633.000,00	44.633.000,00	0,00	0,09
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	501.130.000,00	501.130.000,00	0,00	0,96
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	204.057.000,00	204.057.000,00	0,00	0,39
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	66.004.500,00	66.004.500,00	0,00	0,13
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-	63.280.000,00	63.280.000,00	0,00	0,12

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.535.500,00	19.535.500,00	0,00	0,04
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	36.438.300,00	36.438.300,00	0,00	0,07
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	18.425.000,00	18.425.000,00	0,00	0,04
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	1.687.991.354,00	1.687.991.354,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	14.869.630.750,00	14.869.630.750,00	0,00	28,57
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	2.071.459.210,62	2.071.459.210,62	0,00	3,98
Beban Perjalanan Dinas Biasa	12.718.763.140,00	12.718.763.140,00	0,00	24,43
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.160.000,00	15.160.000,00	0,00	0,03
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	419.556.600,00	419.556.600,00	0,00	0,81
Jumlah	52.051.433.524,12	70.986.687.620,20	18.935.254.096,08	100,00

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Barang dan Jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawsemi Tengah pada Tahun 2024 yaitu Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi yaitu sebesar 28,57 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Sewa Alat Bantu Lainnya yaitu sebesar 0,0006 persen.

Beban barang dan jasa yang merupakan pengeluaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dianggarkan dari belanja barang dan jasa. Namun terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut yang disebabkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Jumlah belanja barang dan jasa sebesar Rp70.986.687.620,20 dan beban barang dan jasa sebesar Rp70.986.687.620,20 sehingga terjadi selisih sebesar Rp18.935.254.096,08. Berikut rincian penjelasan perbedaannya:

1. Terdapat selisih sebesar Rp15.000.000,00, dimana jumlah pengakuan Beban Bahan-Bahan Lainnya lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Bahan-Bahan Lainnya. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan atas nilai Persediaan per 31 Desember Tahun 2024 yang dikapitalisasi ke Aset Tetap – Peralatan dan Mesin, penjelasan mengenai kapitalisasi disajikan pada penjelasan Aset Tetap.
2. Terdapat selisih sebesar Rp28.000.000,00, dimana jumlah pengakuan Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan atas nilai Persediaan per 31 Desember Tahun 2024 yang dikapitalisasi ke Aset Tetap – Peralatan dan Mesin, penjelasan mengenai kapitalisasi disajikan pada penjelasan Aset Tetap.
3. Terdapat selisih sebesar Rp3.097.187,50, dimana jumlah pengakuan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan atas nilai Persediaan per 31 Desember Tahun 2024 yang dikapitalisasi ke Aset Tetap – Peralatan dan Mesin, penjelasan mengenai kapitalisasi disajikan pada penjelasan Aset Tetap.
4. Terdapat selisih sebesar Rp20.400.000,00, dimana jumlah pengakuan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan atas nilai Persediaan per 31 Desember Tahun 2024 yang dikapitalisasi ke Aset Tetap – Peralatan dan Mesin, penjelasan mengenai kapitalisasi disajikan pada penjelasan Aset Tetap.
5. Terdapat selisih sebesar Rp484.508.384,00 dimana jumlah pengakuan Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai Persediaan per 31 Desember Tahun 2024.
6. Terdapat selisih sebesar Rp125.112,00 dimana jumlah pengakuan Beban Tagihan Telepon lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Tagihan Telepon. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan atas nilai Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon per 31 Desember Tahun 2024.

7. Terdapat selisih sebesar Rp6.609.867,00 dimana jumlah pengakuan Beban Tagihan Listrik lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Tagihan Listrik. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan atas nilai Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik per 31 Desember Tahun 2024.
8. Terdapat selisih sebesar Rp7.080.750,00 dimana jumlah pengakuan Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan atas nilai Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan per 31 Desember Tahun 2024.
9. Terdapat selisih sebesar Rp84.789.000,00 dimana jumlah pengakuan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural. Hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi ke Aset Tetap – Gedung dan Bangunan, penjelasan mengenai kapitalisasi disajikan pada penjelasan Aset Tetap.
10. Terdapat selisih sebesar Rp14.035.973.857,08 dimana jumlah pengakuan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi. Hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi ke Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Aset Tetap Dalam Renovasi, penjelasan mengenai kapitalisasi disajikan pada penjelasan Aset Tetap.
11. Terdapat selisih sebesar Rp97.939.000,00 dimana jumlah pengakuan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung. Hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi ke Aset Tetap – Gedung dan Bangunan, penjelasan mengenai kapitalisasi disajikan pada penjelasan Aset Tetap.
12. Terdapat selisih sebesar Rp3.445.976.086,50 dimana jumlah pengakuan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi. Hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi ke Aset Tetap

Dalam Renovasi, penjelasan mengenai kapitalisasi disajikan pada penjelasan Aset Tetap.

13. Terdapat selisih sebesar Rp1.687.991.354,00 dimana jumlah pengakuan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya. Hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi ke Aset Tetap – Gedung dan Bangunan, penjelasan mengenai kapitalisasi disajikan pada penjelasan Aset Tetap.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi	139.975.280.802,00	137.144.438.737,75

Beban penyusutan dan amortisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar Rp139.975.280.802,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.830.842.064,25 atau 2,06 persen dari tahun sebelumnya. Berikut rincian beban penyusutan dan amortisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang tahun 2024.

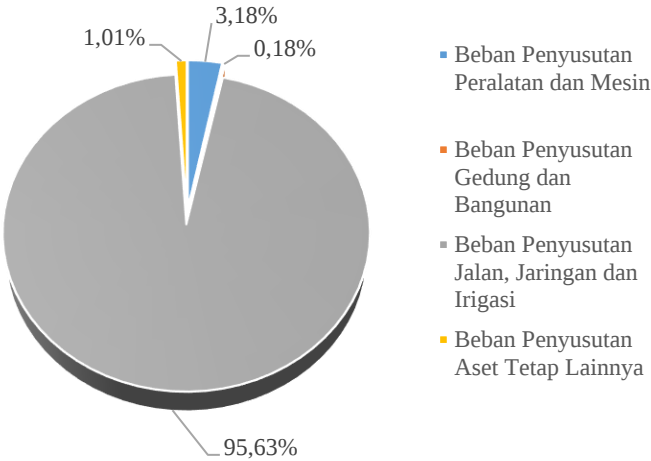
Tabel 5.50
Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.450.104.045,00	3.810.754.079,00	639.349.966,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	255.958.152,00	230.191.495,00	25.766.657,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	133.855.579.243,00	131.804.675.304,75	2.050.903.938,25
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.413.639.362,00	211.117.650,00	1.202.521.712,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	1.087.700.209,00	(1.087.700.209,00)
Jumlah	139.975.280.802,00	137.144.438.737,75	2.830.842.064,25

Tabel di atas menunjukkan bahwa Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.450.104.045,00 mengalami kenaikan sebesar Rp639.349.966,00 dari tahun sebelumnya, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp255.958.152,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.766.657,00 dari tahun sebelumnya, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp133.855.579.243,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.050.903.938,25 dari tahun sebelumnya, Beban Penyusutan Aset

Tetap Lainnya sebesar Rp1.413.639.362,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.202.521.712,00 dan pada tahun 2024 tidak terdapat Beban Penyusutan Aset Lainnya sehingga mengalami penurunan sebesar Rp1.087.700.209,00. Berikut komposisi Beban penyusutan yang terjadi Tahun 2024.

Gambar 5.13
Komposisi Beban Penyusutan
Tahun 2024



Berdasarkan Gambar di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari beban penyusutan dan amortisasi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 yaitu, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 95,63 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yaitu sebesar 0,18 persen.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.3 Surplus/Defisit – LO	(208.659.774.758,12)	(233.473.475.456,75)

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp208.659.774.758,12. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp24.813.700.698,63 atau 10,63 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun 2024. Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.579.723.688.529,33 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.165.613.393.982,98

dikurangi Defisit-LO sebesar Rp208.659.774.758,12 dan ditambahkan RK PPKD sebesar Rp501.699.746.384,47 dan Dampak Kumulatif Perubahan Lain-Lain sebesar Rp121.070.322.920,00. Adapun rincian ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024:

Tabel 5.51
Ekuitas Akhir Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	1.165.613.393.982,98	993.677.228.722,94
Surplus/Defisit-LO	(208.659.774.758,12)	(233.473.475.456,75)
RK PPKD	501.699.746.384,47	327.281.609.369,79
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-lain	121.070.322.920,00	78.128.031.347,00
Ekuitas Akhir	1.579.723.688.529,33	1.165.613.393.982,98

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp1.165.613.393.982,98 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 yang juga sebesar Rp1.165.613.393.982,98.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami defisit Sebesar Rp208.659.774.758,12. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.3 RK PPKD

RK PPKD merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun reciprocal (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan. RK PPKD per 31 desember 2024 sebesar Rp501.699.746.384,47.

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar merupakan pengurangan atau penambahan atas nilai Ekuitas selama tahun 2024. Koreksi Ekuitas

Lainnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar Rp121.070.322.920,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.52
Koreksi Ekuitas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024
Mutasi Bertambah	
Koreksi Nilai Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi	5,00
Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	848.214.600,00
Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.283.244.191,00
Koreksi Berkurang Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.061.379.669,00
Jumlah Mutasi Bertambah	122.192.838.465,00
Mutasi Berkurang	
Koreksi Bertambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	289.758,00
Koreksi Bertambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	152.101.787,00
Penghapusan Aset	970.124.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	1.122.515.545,00
Jumlah	121.070.322.920,00

5.4.5 Analisis Laporan Keuangan

Analisi Vertikal

Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

Rumus

SiLPA LRA Tahun Berjalan = Total Pendapatan - Total Belanja	=	(501.699.746.384,47)
SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(501.699.746.384,47)
Total Pendapatan	=	3.186.569.950,00
Total Belanja	=	504.886.316.334,47
Selisih		0,00

Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 1.579.785.095.105,33$$

$$\text{Aset} = 1.579.785.095.105,33$$

$$\text{Total Kewajiban} = 61.406.576,00$$

$$\text{Total Ekuitas} = 1.579.723.688.529,33$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

2. Kas

Rumus

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = \text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} + \text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = -$$

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = -$$

$$\text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} = -$$

$$\text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Rumus

$$\begin{aligned} \text{Surplus/Defisit LO} &= \text{Total Pendapatan (LO)} - \text{Total Beban (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)} \\ &= (208.659.774.758,12) \end{aligned}$$

$$\text{Surplus/Defisit LO} = (208.659.774.758,12)$$

$$\text{Total Pendapatan (LO)} = 3.119.528.200,00$$

$$\text{Total Beban (LO)} = 211.779.302.958,12$$

$$\text{Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)} = 0,00$$

$$\text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)} = 0$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Akhir

Rumus

Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surlus (Defisit) LO + Koreksi Ekuitas + Ekuitas Dikonsolidasikan	=	1.579.723.688.529,33
Ekuitas Akhir	=	1.579.723.688.529,33
Ekuitas Awal	=	1.165.613.393.982,98
Surlus (Defisit) LO	=	(208.659.774.758,12)
Koreksi Ekuitas	=	121.070.322.920,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	=	501.699.746.384,47
Selisih		0,00

Analisis Horizontal**Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca**

1. Belanja Modal

Rumus

Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap	=	414.147.040.082,27
Belanja Modal	=	414.147.040.082,27
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	3.146.367.931.540,08
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	2.711.791.853.900,23
Selisih		(20.429.037.557,58)

Penjelasan

Selisih sebesar Rp20.429.037.557,58 berasal dari kapitalisasi aset tetap dari belanja jasa sebesar Rp14.429.386.573, reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp6.048.062.393,50 dan koreksi aset tetap sebesar Rp5,00. Adapun mutasi berkurang sebesar Rp48.411.414,00 yang berasal dari belanja modal yang tidak menjadi aset tetap. Untuk rinciannya berada pada penjelasan bagian Neraca

Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	1.165.613.393.982,98
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	1.165.613.393.982,98
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	1.165.613.393.982,98

Selisih	0,00
----------------	-------------

2. Surplus (Defisit) - LO

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE	=	(208.659.774.758,12)
Surplus/Defisit pada LO	=	(208.659.774.758,12)
Surplus/Defisit pada LPE	=	(208.659.774.758,12)
Selisih		0,00

Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Persediaan (LO)

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun	=	4.192.553.089,50
Beban Persediaan (LO)	=	4.177.564.503,50
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	3.759.553.307,00
Persediaan Awal Tahun	=	5.620.097.697,82
Persediaan Akhir Tahun	=	5.187.097.915,32
Selisih		(14.988.586,00)

Penjelasan

Selisih terjadi karena terdapat belanja modal aset tetap yang alihkan ke persediaan sebesar Rp48.411.414,00 dan reklasifikasi dari persediaan ke aset tetap sebesar Rp63.400.000,00.

2. Beban Penyusutan (LO)

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	19.844.428.156,00
Beban Penyusutan (LO)	=	139.975.280.802,00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	1.577.450.421.609,75
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	1.557.605.993.453,75

Selisih

120.130.852.646,00

Penjelasan

Selisih terdapat dikarenakan adanya Koreksi Ekuitas pada Akumulasi Penyusutan tahun berjalan sebesar Rp120.130.852.646,00. untuk rinciannya dapat dilihat pada bagian LPE

BAB VI

PENUTUP

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2024 adalah laporan yang berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 11 Juni 2025
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. H. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19770103 200012 1 002